

**RESPON STAKEHOLDERS TERHADAP KERUSAKAN
HUTAN TAMAN NASIONAL**

(Studi Kasus Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)



Tesis S2

M. Tri Desiantoro
L4K001078

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

Tesis

**RESPON STAKEHOLDERS TERHADAP KERUSAKAN
HUTAN TAMAN NASIONAL**


(Studi Kasus Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)

Oleh:

M. Tri Desiantoro
L4K001078

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Tukiman Taruna

Pembimbing Kedua



Dra. Sri Suryoko, MSi

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

NIP. 130 810 134

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft.: 3214/T/mil / 01
Tgl. 30/12 04

Judul Tesis : **Respon Stakeholders Terhadap Kerusakan Hutan Taman Nasional** (*Studi Kasus Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*).

Nama Mahasiswa : **Muhammad Tri Desiantoro**

Nomor Mahasiswa : **L4K001078**

Program Studi : **Magister Ilmu Lingkungan**

Konsentrasi : **Perencanaan Lingkungan**

Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 6 April 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

1. Pembimbing Utama



Dr. Tukiman Taruna

2. Pembimbing Kedua



Dra. Sri Suryoko, MSi

3. Penguji



Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

4. Penguji



Ir. Sutarno, MS



Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES
NIP. 130 810 134

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, materi yang ada di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan serta informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan atau yang belum/tidak diterbitkan telah dicantumkan sumbernya dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang , April 2004

Muhammad Tri Desiantoro

Riwayat Hidup Penulis



Muhammad Tri Desiantoro, lahir di Kumai tanggal 11 Desember 1974. Anak ke-3 dari empat bersaudara, putra keluarga H. Kadinah dan Hj. Syamiatun Idjam.

Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kumai (1988), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Kumai (1991), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 2 Pangkalan Bun (1993); dan menamatkan di Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Kalimantan Tengah (1999).

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(QS. Ar-Ra'd: 11)*

*Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusu.
(QR. Al-Baqarah: 45)*

*“ Kesabaran itu Pahit, Tapi Buahnya Manis ”
(Bishop Horne)*

*“ Sepanjang Hidup ini Harapan Selalu Ada ”
(Robert)*

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

***Abah dan Mama tercinta atas kasih sayang-Nya dan mendo'akan
selalu akan keberhasilan anaknya,
Mba Eka Sulistyani, Abang Silvariani (Isur), Mas Dwi Untung
Agustono dan Adikku Nur Afriani serta keponakanku
Rejani Saddam yang memberiku semangat untuk keberhasilanku.***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul "**Respon Stakeholders Terhadap Kerusakan Hutan Taman Nasional** (Studi Kasus Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)". Hasil penelitian yang penulis susun dalam bentuk Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro, Koordinator Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Lingkungan beserta staf.
2. Dr. Tukiman Taruna sebagai pembimbing pertama dan Dra. Sri Suryoko, MSi sebagai pembimbing kedua.
3. Para dosen dan rekan-rekan satu angkatan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Soemarno Sekertaris Kecamatan Kumai, Sekertaris Kelurahan Candi, Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan Kumai Hilir, dan Kepala Desa Kapitan yang telah membantu banyak dalam tulisan ini.
5. Kepala Dinas Kehutanan Pangkalan Bun, Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga Tesis dapat diselesaikan.

Namun dalam hal ini penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari apa yang diharapkan, mengingat terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna kesempurnaan penulis Tesis ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, April 2004

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAKS	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan	6
1.4. Manfaat	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)	7
2.2. Masalah Lingkungan Hidup dan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	9
2.3. Peran Serta Masyarakat	11
2.4. Respon Stakeholders dan Persepsi Tentang Lingkungan	14
2.5. Makna Kerusakan Hutan	19
2.6. Sikap Terhadap Lingkungan	20
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu	23
3.2. Metode Penelitian	23
3.2.1. Narasumber	23
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	24
3.2.1.1. Observasi (Pengamatan)	24
3.2.1.2. Wawancara	25
3.2.3. Analisis Data	25
 BAB VI. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Keadaan Umum Masyarakat Kecamatan Kumai	27
4.2. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting	30
4.2.1. Sejarah Penetapan Kawasan	30
4.2.2. Kondisi Geografis Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting	31
 BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Kerusakan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting	32
5.2. Respon Stakeholders Terhadap Hutan Taman Nasional Tanjung Puting	35
5.2.1. Respon Pemda	35
5.2.2. Respon Masyarakat	42

5.2.2.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan dan Kerusakan Taman Nasional Tanjung Puting	44
5.2.2.2. Peranserta dan Harapan Masyarakat Terhadap Taman Nasional Tanjung Puting	45
5.2.3. Respon Pengusaha	46
5.2.4. Respon LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ...	47
5.2.4.1. Persepsi Terhadap Kebijakan dan Kerusakan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting	47
5.2.4.2. Peranserta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	48
5.3. Analisis Respon Stakeholders	49
5.3.1. Analisis Respon Pemda	49
5.3.2. Analisis Respon Masyarakat	50
5.3.3. Analisis Respon Pengusaha	52
5.3.4. Analisis Respon LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	52
5.4. Usulan Peranserta Stakeholders	53
5.4.1. Usulan Peranserta Pemda	53
5.4.2. Usulan Peranserta Masyarakat	55
5.4.3. Usulan Peranserta Pengusaha	55
5.4.4. Usulan Peranserta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	56
5.5. Pendekatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting	56
5.6. Usulan Perencanaan	61
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	63
6.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Teks

1. Beberapa Stakeholders	17
2. Narasumber Penelitian	24
3. Luas Wilayah Kecamatan Kumai Menurut Rincian Peruntukan/Peruntukan Lahan	27
4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Kumai	28
5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	29
6. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Kumai	29
7. Alokasi Luas Kerusakan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting	33

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
	<i>Teks</i>	
1.	Alur Pikir	22
2.	Kerusakan hutan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting	32
3.	Prasarana transportasi rel digunakan mengeluarkan kayu dari hutan	34
4.	Pos Penjagaan aparat Jagawana Balai Taman Nasional Tanjung Puting	36
5.	Salah satu pondok para pencuri kayu diketemukan tim pada saat operasi gabungan	37
6.	Himbauan Pemda dan Polres Kotawaringin Barat dalam Bentuk spanduk di jalan	38
7.	Penanaman Mangrove sebagai bentuk penghijauan di pinggiran pantai hutan Taman Nasional Tanjung Puting	39
8.	Kayu yang ada di stapel dari kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting disita disaat operasi Wanalaga I tahun 2003	40
9.	Kegiatan loding (muat kayu) di tengah laut supaya tidak terlihat oleh aparat	41
10.	Salah satu obyek wisata yang akan dikembangkan yaitu di Danau burung oleh pihak Balai Taman Nasional Tanjung Puting	44
11.	Tanah kritis akibat dari penambangan emas tanpa ijin (PETI)	58

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Halaman

Teks

1. Peta Kecamatan Kumai	70
2. Peta Taman Nasional Tanjung Puting	71
3. Gambar-Gambar disaat operasi gabungan berlangsung	72
4. Panduan Wawancara	73
5. Surat Keterangan dari Kecamatan Kumai	74
6. Surat Keterangan dari Balai Taman Nasional Tanjung Puting	75
7. Surat Keterangan dari Kelurahan Candi	76
8. Surat Keterangan dari Kelurahan Kumai Hulu	77
9. Surat Keterangan dari Kelurahan Kumai Hilir	78
10. Surat Keterangan dari Desa Kapitan	79
11. Berita Acara Tim Operasi Gabungan	80

ABSTRAKS

Muhammad Tri Desiantoro. Respon Stakeholders Terhadap Kerusakan Hutan (Studi Kasus Hutan Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)

Hutan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah terancam punah. Kebakaran hutan, konversi perkebunan kelapa sawit, serta penebangan liar dipandang sebagai penyebab proses kerusakan hutan.

Penelitian respon stakeholders terhadap kerusakan hutan TNTP meliputi 4 kelurahan di sekitar kawasan hutan yaitu Kelurahan Candi, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Kumai Hulu dan Desa Kapitan serta Pemerintah daerah Kotawaringin Barat dan Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Metode observasi secara langsung dan wawancara digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan data. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur terhadap komponen masyarakat setempat, aparat dinas kehutanan serta aparat Balai TNTP Departemen Kehutanan. Hasil penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif menggunakan rancangan alur pikir masalah.

Pemerintah daerah Kotawaringin Barat telah menganggarkan bantuan dana (Rp 300 Juta) untuk rehabilitasi kerusakan kawasan hutan, melakukan himbauan, operasi pengamanan dan penjagaan, pengembangan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha, serta menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan. Sementara masyarakat kurang memiliki kepedulian karena hanya mampu memanfaatkan hutan tanpa disertai upaya pelestarian. Lemahnya kesadaran masyarakat menjadi lebih parah dengan adanya perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi hasil hutan. Sebagai Pengelola Kawasan Taman Nasional Balai TNTP Departemen Kehutanan telah mengupayakan sistem pengelolaan berdasarkan zonasi namun dipandang kurang memenuhi kepentingan ekonomi masyarakat serta kurang tersosialisasi dan terkoordinasi.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang peduli terhadap Taman Nasional Tanjung Puting yaitu *Conservation Internasional Indonesia (CII)*, dan Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin). Permasalahan kerusakan lingkungan Taman Nasional Tanjung Puting tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah, penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Pihak LSM yang peduli terhadap kondisi kawasan hutan lebih memusatkan pada tindakan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat sekitar. Hal ini tampak ditunjukkan oleh mereka dengan adanya program pendidikan ataupun pelatihan bina lingkungan. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak LSM bertujuan untuk menguatkan kesadaran lingkungan masyarakat disertai kemandirian dalam mengatasi kebutuhan hidup.

Evaluasi dan analisis dengan Pendekatan tujuh langkah perencanaan pengelolaan lingkungan kawasan hutan TNTP memerlukan peranserta Pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah sebagai 'pemberi contoh' diharapkan memiliki peranserta dalam penanganan dan pengembangan aspek perbaikan kondisi hutan, aspek perlindungan dan pengamanan, serta aspek pembinaan kesadaran lingkungan masyarakat. Seluruh peranserta harus bersifat koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak.

ABSTRACT

Muhammad Tri Desiantoro. Stakeholders response to the destruction of forest (Case Study Concerning Tanjung Puting National Forest Garden, subdistrict Kumai, West-Kotawaringin Regency Central Kalimantan Province).

Forest Conservation in Tanjung Puting National Garden (TNTP). Kumai sub-district, West Kotawaringin Regency Central Kalimantan is threatened to be entirely destroyed. Forest-fire, the conversion into palm oil-plantation and wild-cutting are seen to be the cause of the process of forest-damage.

The rescarch covered 4 villages surrounding the forest: Candi-village, Kumai Hilir Village, Kumai Hulu village and Kapitan village West Kotawaringin regency and Balai Tanjung Puting National garden. A direct observational method and interview was used as the methods to get data. Interview was done non-structurally among the local community components, the apparatus of the local Forest department and the apparatus of Balai TNTP of the Forest department. Result of the research was analyzed according to the descriptive-qualitative methods.

West Kotawaringin Regency Government has allocated a budget (Rp. 300 million) as support to be used for rehabilitation on the damage of the forest area, gives instruction to do efforts to execute order and supervision, to develop community economy by a diversification of efforts/business, and determined to develop wise regulations. While the community had only little attention for they can only make use of the forest without any effort to conserve the forest. It becomes worse because the existence of big industries exploring the products of the forests. As the organizer of this area, TNTP biro of the Forest-Department has made efforts to apply the system for the maintenance based on 'zonation' but it doesn't seem enough for the community's economical interest beside the fact that it has not been enough coordinated and socialized.

NGO (Non Government Organization), who give attention to Tanjung Puting National Park, which is Conservation Internation Indonesia (CII) and Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin). The issue on the damage of Tanjung Puting not merely the government's task and responsibility. NGO giving attention to this forest condition, concentrate most on educative and persuasive act to the society. This shows by establishment of Environment construction education and training. Approach done by NGO has a purpose to improve society environment awareness followed by independency to deal with the need of living.

Using seven measurement of plan TNTP damage should be approached by (a) the need of community participation, (b) local goverment enporvening, and NGO's involvement.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menipisnya sumber daya alam dan perusakan lingkungan sebenarnya mengikuti perkembangan hubungan manusia dengan alam. Pada tahap awal, aktivitas pemenuhan tidak merusak lingkungan. Kemudian pada tahap dimana manusia meyakini seolah-olah kekuasaannya terhadap alam semakin besar, perkembangan teknologi yang dimaksudkan untuk mengolah sekaligus mengeksploitasi alam berlangsung dengan pesat. Pada titik inilah mulai tampak berbagai dampak lingkungan yang serius. (Hadi, 2000)

Perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh manusia, telah membawa perubahan di antaranya dalam cara memproduksi dan pola konsumsi. Perkembangan teknologi memungkinkan adanya produksi yang bersifat massal, mengakibatkan barang-barang konsumsi menjadi begitu banyak tersedia dan mudah di dapat. Tapi di sisi lain juga berakibat pada eksploitasi secara besar-besaran terhadap lingkungan alam sebagai sumber daya alam, sehingga dapat terjadi kelangkaan sumber daya alam atau bahkan kepunahan. (Soemarwoto, 2001).

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Manfaat hutan secara *langsung* adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Ada delapan manfaat hutan secara *tidak langsung*, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat

dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara. Di dalam Agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 disebutkan manfaat hutan sebagai paru-paru dunia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 1, *Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu*. Sedangkan bunyi Pasal 1 Ayat 2 definisi *Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan*. (Anonymous, 2000)

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

1. unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan;
2. unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna;
3. unsur lingkungan; dan
4. unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah); flora, dan fauna; beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. (Salim H.S. 1995)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 10, menyebutkan *Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan*. Selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Pasal 1 Ayat 14

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan *Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.*

Adanya Penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu: (1) agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan kepada Pemerintah c.q. Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian, dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Menurut Salim, H.S. (1995) Indonesia mempunyai hutan seluas lebih kurang 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, dan hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha. (Herman Haeruman, 1992 dalam Salim, H.S. 1995).

Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organisasi PBB, yaitu *Food and Agriculture Organization (FAO)*, pada tahun 1991 dikemukakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri seluas 1.314.700 ha per tahun. Apabila dipersentasekan, kerusakan rata-rata 1,2% per tahun. Hal ini

dapat diperkirakan dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun hutan tropis Indonesia akan habis. (Salim,H.S. 1995).

Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah adalah salah satu hutan konservasi paling luas di Indonesia ini terancam punah. Jutaan kubik kayu langka dicuri dari situ dan diperdagangkan secara ilegal. Volume perdagangan kayu itu mencapai Rp 70 miliar lebih per tahun.

Selain sebagai hutan konservasi hutan ini juga ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh pemerintah karena di dalamnya terdapat hewan primata yang dilindungi oleh pemerintah yaitu Orangutan (*Pongo pygmaeus*). Dan saat ini, kondisi hutan Taman Nasional Tanjung Puting memang sudah mengenaskan. Selain kebakaran hutan dan konversi menjadi perkebunan kelapa sawit, penebangan liar yang merajalela membuat habitat bagi orangutan makin menciut. (Anonymous, 2002).

Pelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), tidak akan berhasil dengan baik, tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting tersebut, karena merekalah yang dekat dan langsung berinteraksi dengan keberadaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting itu. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui respon stakeholder di sekitar hutan Taman Nasional Tanjung Puting guna pelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting karena hutan tersebut sebagai tempat pendidikan dan penelitian, karena di dalamnya bermukimannya hewan primata Orangutan (*Pongo pygmeus*) dan masih banyak lagi flora dan fauna di lokasi tersebut.

Masalah pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari pesatnya pembangunan, adalah suatu masalah yang perlu segera diatasi. Dalam pembangunan ini dapat dilihat, misalnya, bahwa akibat tekanan kepadatan penduduk di beberapa bagian daerah tertentu, khususnya di pulau Jawa untuk

menggunakan kawasan hutan, yang sebenarnya harus dilindungi, guna kegiatan pertanian. Hal ini telah mengakibatkan kerusakan dan kemudian diikuti oleh bahaya banjir yang datang berulang kali. Di samping itu terdapat juga di pelbagai daerah di Indonesia kelompok penduduk yang hidup dari usaha pertanian berpindah-pindah. Keadaan ini menimbulkan pula perusakan hutan karena pembakaran dan berbagai tindakan serupa lainnya.

Menurut Niniek Suparni (1994) kemerosotan lingkungan hidup adalah produk masyarakat. Karena itu, tantangan ini hanya dapat diselesaikan oleh keterlibatan masyarakat tanpa pandang bulu.

Ketidakpedulian akan kerusakan lingkungan hidup akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Jika sekelompok orang mulai tidak peduli pada perbuatannya yang merusak alam, orang lain yang akan menjadi korban. Jika orang lain itu yang merusak alam, maka orang lainnya lagi yang akan menjadi korban.

Polusi yang menimpa sungai di hulu, akan dirasakan akibatnya oleh masyarakat yang berada di tepi sungai itu sampai ke muara. Bahkan orang yang makan ikan laut yang tercemar, akan terkena akibatnya walaupun bertempat tinggal ratusan kilometer dari pusat polusi. (Ninie Suparni, 1994).

1.2. Permasalahan

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa hutan Taman Nasional Tanjung Puting rusak parah, karena hutan tersebut yang dulu dikenal memiliki fungsi ekologis, juga sosial ekonomi seperti hasil hutan tropis dataran rendah yang didominasi jenis kayu Meranti (*Shorea sp*), Ramin (*Gonystylus bancanus*), Jelutung (*Dyera constulata*), dan kayu Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), hampir tidak ada lagi. Hal inilah yang mendasari penelitian ini karena hutan tersebut dari tahun ke tahun bukannya bertambah baik melainkan malah semakin rusak. Menurut data KCDK (Kantor Cabang Dinas Kehutanan Pangkalan Bun, 2001),

Potensi Tegakan Pohon Ramin (*Gonystylus bancanus*) sekitar $\pm 60 \text{ m}^3 / \text{ha}$, yang sudah dieksplotasi (ditebang/curi) sekitar $\pm 40 \text{ m}^3 / \text{ha}$, sedangkan pohon Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) sekitar $\pm 165 \text{ m}^3 / \text{ha}$, dan pohon Meranti campuran (*Shorea sp*), sekitar $\pm 256 \text{ m}^3 / \text{ha}$. Atas data kerusakan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- Bagaimanakah respon stakeholders terhadap kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting?
- Usulan perencanaan pengelolaan dan pelestarian macam apakah yang cocok untuk perbaikan kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui dan mengevaluasi respon stakeholder terhadap kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, dan
2. Merumuskan usulan perencanaan pengelolaan dan pelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Masukan untuk perbaikan respon terhadap kerusakan.
2. Sebagai masukan dalam penetapan kebijakan pelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)

Good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek tersebut disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep "*good governance*" dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. (Sedarmayanti, 2003)

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. (Sedarmayanti, 2003)

Otonomi daerah yang secara resmi telah diberlakukan sejak bulan Januari 2001 membawa implikasi pada pengelolaan lingkungan. Semangat mencari sumber-sumber pendapatan menimbulkan kekawatiran bahwa nasib lingkungan

akan diperlakukan sebagai aset. Jika hal ini terjadi, maka kerusakan dan menipisnya sumber daya alam makin parah. (Hadi, 2001).

United Nations Development Program (UNDP dalam ICEL, 1999) mendefinisikan *governance* (pemerintahan) sebagai "pelaksana kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa". *Governance* dikatakan baik (*good* atau *sound*) apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif, efisien yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Tentu saja pengelolaan yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat menuntut adanya iklim demokrasi dalam mengelola sumber daya dan masalah-masalah publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelibatan masyarakat (*genuine public participation*), akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi (*transparency*). *Good governance* dengan demikian sangat bergantung pada peranserta masyarakat secara luas untuk menjamin bahwa prioritas di bidang politik, sosial dan ekonomi berdasarkan konsensus masyarakat (*a broad societal consensus*) – bukan pintu tertutup. Masyarakat yang "tuna akses" termarginalkan dalam pembangunan selama ini harus dijamin memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya pembangunan (*allocation of development resources*). Disamping menuntut persyaratan mewadahi aspirasi orang banyak (*aspirative*), *good governance* mensyaratkan *rule of law* dan birokrasi yang transparan. (*ICEL, 1999*).

Terdapat tiga (3) elemen/faktor penting sebagai penentu terwujudnya *good governance* yaitu elemen-elemen negara (*state*) meliputi pemerintah, lembaga peradilan, maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), swasta (*private sector*) meliputi industri, pengusaha, perbankan maupun koperasi, dan masyarakat sipil (*civil society*) meliputi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Aktor negara menentukan kondusivitas (*conduciveness*) sistem politik dan hukum, faktor swasta

menciptakan pekerjaan dan sumber pendapatan masyarakat, sedangkan masyarakat sipil memfasilitasi dan memobilisasi peranserta masyarakat dalam politik, sosial dan ekonomi. (ICEL, 1999).

Untuk mencapai *good governance* yaitu pengelolaan urusan-urusan publik secara transparan, *accountable*, dan partisipatoris sehingga efisien, efektif dan aspiratif maka elemen-elemen negara yang meliputi pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun lembaga peradilan harus berfungsi optimal dan efektif. Masyarakat sipil harus mampu menjalankan peranannya sebagai penyalur aspirasi rakyat dan *publik watchdog*. Sektor swasta harus diberikan jaminan bahwa kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik, dan menaati norma-norma sosial serta aturan hukum. Untuk mencapai hal tersebut, *good governance*, dengan demikian mensyaratkan 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyalur aspirasi rakyat yang efektif (*effective representative system*);
2. Pengadilan yang mandiri, bersih dan profesional (*judicial independence*);
3. Aparatur pemerintah (birokrasi) yang memiliki integritas yang kokoh dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat (*strong, reliable dan responsive bureaucracy*);
4. Masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol publik (*strong and participatory civil society*); dan
5. Desentralisasi dan lembaga perwakilan di daerah yang kuat (*democratic decentralization*). (ICEL, 1999)

2.2. Masalah Lingkungan Hidup dan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti tingginya laju perusakan hutan, meningkatnya masalah lingkungan perkotaan, bencana kebakaran hutan

di tahun 1997-1998, serta konflik masyarakat dengan perusahaan tambang yang terjadi berbagai wilayah disebabkan oleh faktor pokok yaitu tidak dimilikinya kelima elemen *good governance*. (ICEL, 1999).

Perusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 8 UULH tahun 1982 sebagai berikut:

"Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan." (Suparni, 1994).

Pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah memunculkan dua pendapat yang terus berkembang. Satu pendapat yang pada umumnya datang dari kalangan pakar dan aktivis lingkungan menyatakan bahwa otonomi daerah akan menimbulkan implikasi buruk bagi lingkungan karena semangat daerah untuk mendulang pendapatan asli daerah (PAD) dengan semata-mata hanya mengandalkan sumber daya alam. (Hadi 2002)

Terciptanya *good governance* merupakan persyaratan pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang efektif karena pengelolaan lingkungan hidup yang efektif sangat tergantung pada berfungsinya sistem politik yang menjamin demokrasi dan *rule of law*. Namun demikian pemerintah yang sudah mampu mewujudkan *good governance* belum tentu memiliki keperdulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Ketidakperdulian ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang diambilnya, khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu pemerintah yang telah mengupayakan terwujudnya *good governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu upaya mengaitkan seluruh kebijaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*). Menggabungkan antara elemen *good governance* dengan aspek

keberlanjutan ekologis inilah yang dapat kita definisikan sebagai pemerintahan yang baik yang mempunyai visi keberlanjutan dan perlindungan daya dukung ekosistem (*good environmental governance*). (ICEL, 1999)

2.3. Peranserta Masyarakat

Peranserta masyarakat menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 37 Ayat 1 berbunyi: *Peranserta masyarakat dalam konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.* Pengertian masyarakat Menurut Luth dan Fernandez dalam Nurdin, (2000) adalah kumpulan individu yang bertempat tinggal pada suatu wilayah tertentu yang batas-batasnya jelas ditunjang oleh faktor adanya hubungan yang kuat di antara sesama anggota kelompok. Sedangkan peranserta merupakan istilah yang sama artinya dengan *keikutsertaan, keterlibatan, dan partisipasi*. Peranserta atau partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi, kebijakan, memikul beban, dan pelaksanaan kegiatan serta memetik hasil dan manfaat kegiatan secara berkeadilan. (Tjokromidjojo, 1997).

Lebih lanjut Hardjasoemantri (1997) menyebutkan bahwa dengan adanya peranserta masyarakat, menyebabkan anggota masyarakat mempunyai potensi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan dan mengusahakan keberhasilannya. Dengan pengertian lain, peranserta adalah keterlibatan seseorang untuk menciptakan, menyelenggarakan serta memelihara lingkungan hidupnya dengan baik, sehingga lingkungan hidup terjamin kelestariannya. Partisipasi berarti memberikan sumbangan dalam turut menentukan arah dan tujuan pembangunan, dimana ditekankan bahwa partisipasi adalah hak dan kewajiban dari setiap masyarakat. (Soetrisno, 1995)

Hadjasoemantri (1990) mengemukakan beberapa pokok pikiran yang melandasi peranserta masyarakat yaitu:

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah

Artinya peranserta masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian Pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang perlu diperhatikan.

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga yang telah memperoleh kesempatan untuk berperanserta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu masalah, akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peranserta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat.

3. Membantu perlindungan hukum

Apabila suatu keputusan akhir diambil dengan memperlihatkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan itu berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan ke pengadilan, lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu.

4. Mendemokrasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan dengan peranserta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintah dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan: *peranserta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain penyampaian informasi atau saran kepada Pemerintah, melakukan pengawasan terhadap lingkungan, dan pengimplementasian kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.*

Berdasarkan pendapat di atas dapat menunjukan bahwa dalam peranserta ada 3 (tiga) variabel utama yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Keterlibatan pikiran dan perasaan yang lebih besar dari keterlibatan jasmani, dalam hal ini adalah persepsi masyarakat terhadap lingkungan.
2. Kesiediaan memberikan bantuan atau kontribusi pada pencapaian tujuan kelompok sebagai refleksi rasa senang dan sukarela membantu, dalam hal ini adalah sikap masyarakat terhadap lingkungan.
3. Bertanggung jawab sebagai faktor yang sangat dominan menyangkut perasaan menjadi bagian dari kelompok sebagai manifestasi *sense of belonging and togetherness* dalam bentuk kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Angel (dalam Muray dan Lappin, dikutip dalam Nurdin, 2000) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat peranserta seseorang untuk mengikuti kegiatan lingkungannya, adalah sebagai: (1) Umur, (2) Pekerjaan, (3) Penghasilan, (4) Pendidikan dan (5) Lama tinggal. Dalam uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut, diterangkan bahwa; (a) individu dengan usia menengah ke atas cenderung untuk aktif berperanserta dalam kegiatan yang ada di lingkungannya; (b) individu dengan pekerjaan yang tetap cenderung untuk berperanserta; (c) individu dengan penghasilan makin tinggi makin berperanserta. Secara umum, bila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka ia cenderung untuk

tidak berperanserta. Oleh karena itu, pekerjaan dan penghasilan merupakan faktor yang dapat menempatkan individu pada posisi atau kelas ekonomi tertentu dalam masyarakat, dan hal tersebut akan berperan dalam menentukan aktivitas yang diikuti individu. (Ciptana, 2002)

Debat publik merupakan salah satu bentuk dari peranserta masyarakat. Ia amat diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan agar lebih baik dan rasional. Hal ini bertolak dari keyakinan bahwa jika publik (masyarakat) dilibatkan dalam pengambilan keputusan mereka cenderung bisa memahami perencanaan pembangunan baik dalam bentuk kebijaksanaan, program atau proyek. Jika pengambilan keputusan dilakukan secara fair akan mengeliminasi segala bentuk kejutan yang ditimbulkan oleh perencanaan pembangunan. Secara politis, peranserta masyarakat memungkinkan diperolehnya masukan yang reflektif yang diperlukan untuk kelangsungan demokrasi. Ia menawarkan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan gagasannya baik langsung maupun tidak langsung. Peranserta masyarakat juga menjadi forum pendidikan publik baik melalui proses pemahaman tentang kebijaksanaan maupun melalui proses bagaimana suatu keputusan diproses. (Hadi, 2001)

2.4. Respon Stakeholders dan Persepsi Tentang Lingkungan

Kelangsungan hidup manusia selalu tergantung pada lingkungan hidupnya. Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Makin tinggi kebudayaan manusia, makin beranekaragam kebutuhan hidupnya. Makin besar jumlah kebutuhan hidup yang diambil dari lingkungan, maka makin besar pengaruh manusia terhadap lingkungan . (Supardi, 1994 dalam Ciptana, 2002).

Di Jawa, seluruh hutan yang pernah ada telah musnah akibat pembangunan. Hilangnya jenis habitat diikuti oleh musnahnya spesies yang hidup di areal hutan tersebut. Di Sumatra dan Kalimantan, yang memiliki spesies

keendemikan lokal yang sangat tinggi. Jika pembangunan yang telah terjadi di pulau Jawa juga diterapkan di pulau Sumatra dan Kalimantan maka niscaya akan terjadi pemusnahan jenis secara besar-besaran. (Win Giesen, 1994). Oleh karena itu adanya respon dari stakeholders merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi hal tersebut.

Respon stakeholders terhadap kerusakan hutan/lingkungan ini dapat diwujudkan dengan upaya/usaha penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan dari segi teknologi. Menurut Nani Djuangsih (1994) upaya tersebut pada prinsipnya menyangkut 2 (dua) hal yaitu:

1. Pengendalian pada sumbernya
2. Pengendalian di lingkungannya

Menurut Ali (1987) respon adalah tanggapan atau jawaban terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan apa yang terjadi di lingkungan. Sedangkan menurut Roestandi (1992) respon adalah reaksi sesaat terhadap sesuatu yang terjadi terhadap lingkungan. Respon atau tanggapan pemerintah terhadap usaha pemerintah daerah terhadap keadaan di era otonomi daerah termasuk lingkungan. (Anonymaus, 2002). Hal ini membutuhkan suatu kebijakan baru, dimana kebijakan ini adalah suatu tindakan yang mengarah kepada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah lingkungan yang mempengaruhi terhadap sebagian masyarakat. (Abdul Wahab, 2001). Respon dari stakeholders dalam usaha mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Respon Pemerintah terhadap kerusakan lingkungan ini diwujudkan dengan adanya, kebijakan, peraturan, perundang-undangan dalam kaitannya dalam kaitannya dengan penaggulangan pencemaran lingkungan yang bersifat nasional yaitu dengan adanya Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada pun bunyi Pasal 1, Ayat 1 dan 2 sebagai

berikut: *Lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidupnya.* Sedangkan pada ayat 2 bunyinya: *Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.* Sebelum dikeluarkan Undang-undang tersebut diatas sebagai respon pemerintah dibentuk perundang-undangan yang bersifat sektoral sesuai dengan kewenangan dari instansi/departemen dalam pengelolaan kegiatan yang bernaung di bawahnya. Ada pun bentuk peraturan tersebut adalah sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan di daerahnya/kewenangannya masing-masing yaitu berupa peraturan, instruksi, keputusan menteri untuk tingkat Departemen, sedangkan untuk tingkat daerah dapat berupa peraturan daerah atau keputusan/instruksi Gubernur. (Nani Djuaningsih, 1994). Sedangkan respon dari masyarakat bisa berupa peranserta atau pelibatan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang rusak, ini bisa di bantu oleh pihak yang terkait dengan keberadaan lingkungan dimana mereka berdiam. Seperti pelibatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pengusaha dan instansi yang terkait.

Selanjutnya pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan oleh stakeholders adalah:

- a. Pengendalian ini bertitik berat pada perencanaan sehingga pencemaran/kerusakan sudah dapat diperkirakan sebelumnya dengan rencana yang sesuai.
- b. Pada setiap daerah harus telah disusun "*masterplan*" yang mengatur letak industri, permukiman, jalur transportasi dan lainnya sehingga pengaruh pecemaran/kerusakan dapat dikurangi.

Dengan diberlakukanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan peraturan Pemerintah tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diharapkan dampak negatif dari kegiatan pembangunan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin.

Stakeholders yaitu pihak yang dapat menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi. (Hanafi, 1997). Ada pun contoh stakeholders seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Beberapa Stakeholders

No	Stakeholders
1.	Pemerintah Pusat
2.	Pemerintah Daerah
3.	Komunitas Masyarakat
4.	Perguruan Tinggi
5.	Kelompok Kepentingan
6.	Karyawan
7.	Sistem Peradilan

Sumber: Hanafi (1997)

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data. (Pareek, 1991 dalam Ciptana). Selanjutnya Pareek (1991) dalam Ciptana (2002) menyebutkan bahwa dalam definisi persepsi tercakup beberapa segi atau proses yang terdiri dari:

1. Proses menerima rangsangan merupakan proses penerimaan oleh panca indra terhadap rangsangan atau data dari berbagai sumber melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan rabaan.
2. Proses menyeleksi rangsangan merupakan proses penyaringan atau penyeleksian terhadap rangsangan atau data yang diterima untuk diproses lebih lanjut.

3. Proses pengorganisasian merupakan proses pengelompokan data atau rangsangan hasil seleksi kedalam berbagai bentuk agar dapat diterima dan masuk akal.
4. Proses penafsiran terhadap data yang diterima dengan berbagai cara. Persepsi pada pokoknya memberikan arti kepada berbagai data dan informasi yang diterima.
5. Proses pengecekan merupakan proses untuk mengecek benar atau salahnya penafsiran yang telah dilakukan terhadap suatu data melalui berbagai tindakan.
6. Proses reaksi sebagai proses terakhir dari persepsi berupa tindakan sehubungan dengan yang telah diserap.

Manusia yang berhubungan dengan lingkungannya dipengaruhi oleh persepsi dan perilaku manusia terhadap lingkungan, padahal perilaku lingkungan itu sendiri tergantung dari image atau citra/gambaran kesan masing-masing orang terhadap dunia. Perilaku lingkungan juga tergantung dari lokasi dan situasi. (Knowles dan Wareing, 1981 dalam Ciptana, 2002).

Proses persepsi tentang lingkungan berikut model mental dipengaruhi oleh pengalaman seseorang dan pengaruh budaya terhadap pembentukan kesimpulan tentang lingkungan. Oleh karena dunia nyata menghadirkan individu dengan begitu banyak gambaran pilihan-pilihan dan masalah-masalah, maka manusia mengadakan proses seleksi melalui kebudayaan untuk mengadakan reaksi terhadap stimulasi atau rangsangan, sehingga manusia menyusun pola. Sebagai hasilnya, kenyataan hanya dialami manusia melalui saringan kebudayaan yang menyeleksi berdasarkan pertimbangan, tradisi sosial, tujuan ekonomi, dan lainnya. (Knowles & Wareing, 1981 dalam Ciptana, 2002).

2.5. Makna Kerusakan Hutan

Istilah 'Kerusakan hutan' yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Di satu sisi, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan/tanpa adanya persetujuan pemerintah.

Kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif di dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Di antara sifat negatifnya digolongkan sebagai tindakan melawan hukum, di samping itu tergolong pula sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan di antaranya yaitu:

- a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum.
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi perbuatan karena kelalaian subjek hukum meliputi dan/atau badan hukum.
- c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam (misalnya, gempa bumi, letusan gunung, banjir, kebakaran, dan sebagainya).
- d. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Dari keseluruhan makna kerusakan hutan maka istilah perusakan hutan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah:

- a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan subjek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung ketentuan pidana khusus. Antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.

Karena itu, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki hutan tanpa ijin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana sebagaimana dimuat di dalam perundang-undangan.

Sebaliknya, dengan ijin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam kategori perusakan hutan. Misalnya, kegiatan eksplotasi hutan bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembukaan hutan untuk permukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri, dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui pemerintah. (Zain, 1996)

2.6. Sikap Terhadap Lingkungan

Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Ada pun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup.

- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
- e. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kelestarian alam sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Ironisnya, justru kerusakan alam dan penurunan daya dukung lingkungan sebagian besar diakibatkan oleh manusia dengan berbagai kepentingan. Dengan demikian, berarti terdapat kesenjangan pada manusia tentang belum dimilikinya kesadaran dan kepedulian. Untuk itu maka kesenjangan tersebut harus segera diambil tindakan agar manusia memahami pentingnya mengelola lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan, informasi, dan sebagainya. (Pramudya Sunu, 2001)

Peranserta atau partisipasi merupakan sikap untuk ikut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi suatu aktivitas. Karena merupakan sikap, maka konsep ini dapat diukur dengan indikator-indikator sikap, tapi dapat juga diukur dengan indikator hasil perbuatan yang secara terbatas menunjukkan adanya sikap tersebut. Selanjutnya disebutkan ada 2 (dua) jenis indikator sebagai berikut:

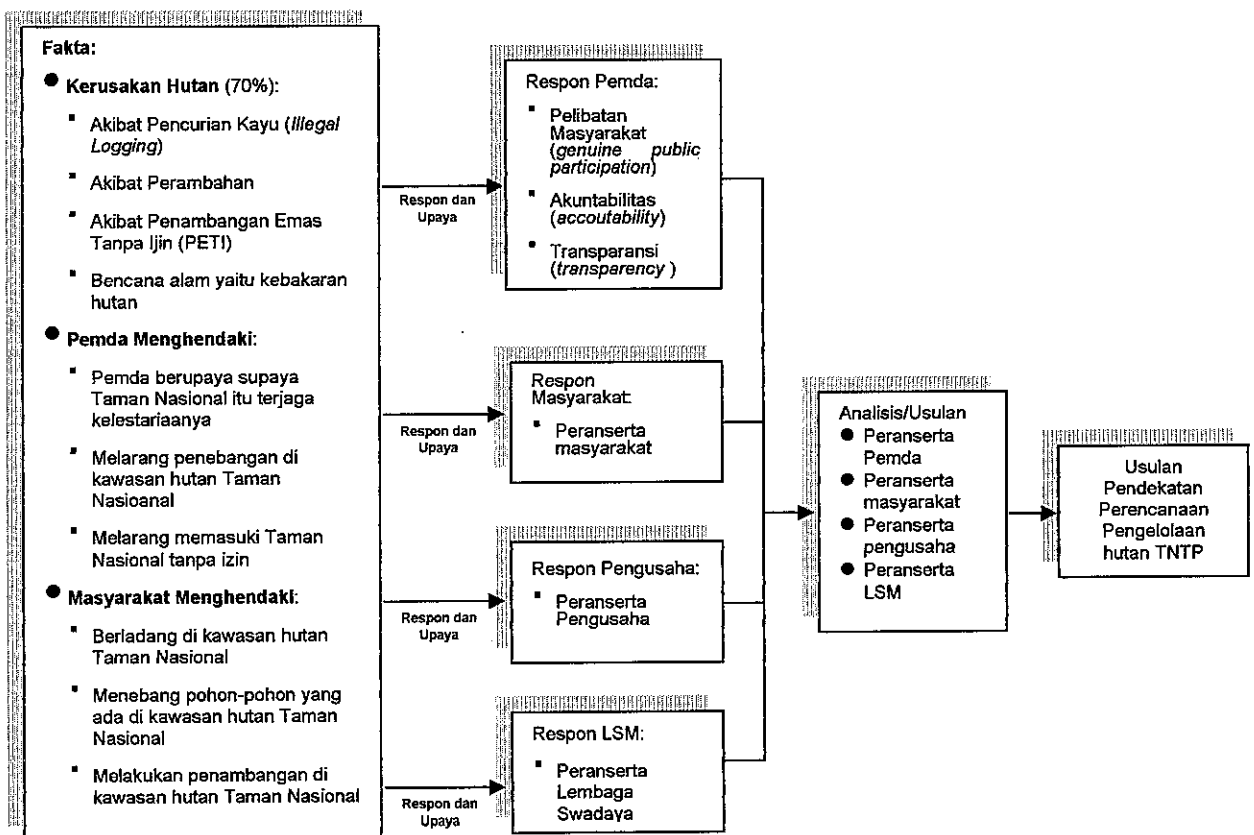
1. Sikap selama perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu aktifitas/program.
2. Frekuensi dan kualitas keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu aktifitas/program.

Menurut David C. Korten (1986), sesungguhnya masyarakat dapat diajak berperilaku arif dan bijaksana terhadap lingkungannya, manakala ia diberi stimulus yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya masyarakat, tidak akan ambil bagian dalam program pemerintah (pelestarian lingkungan hutan Taman Nasional Tanjung Puting), manakala masyarakat merasa tidak memperoleh manfaat apa pun dari program tersebut.

Menurut Salim,H.S., (1997), ada dua cara untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak negara atas hutan yaitu:

- (1) Usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan, dan
- (2) Usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan oleh Polisi Hutan (Polhut/Jagawana).

Permasalahan pelestarian di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting seharusnya mengambarkan respon dan upaya Pemda yang menetengahkan peranan Pemda sebagai birokrasi yang memiliki integritas yang kokoh dan respon terhadap pelestarian. Di lain pihak pelestarian di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting juga harus sanggup mengakomodasikan partisipasi masyarakat. Alur pikir yang dikembangkan ialah:



Gambar 1. Alur Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mengambil 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Candi, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Kumai Hulu dan Desa Kapitan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penelitian yang didasarkan atas tujuan tertentu (Singarimbun, 1981), karena lokasi tersebut saling berkaitan erat sekali dengan keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat Kecamatan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah.

Tiga (3) Kelurahan dan 1 (satu) Desa, diambil sebagai lokasi penelitian ini dengan alasan karakteristik penduduk yang kompleks, terdiri dari kelompok sosial mata pencaharian atau kegiatan seperti daerah permukimannya, pertanian, pedagang, nelayan, penambang (emas) penjual jasa transportasi pemungut hasil hutan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas keberadaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Alasan lain adalah wilayah yang tidak terlalu luas, karena Kelurahan satu dengan yang lain cukup berdekatan dan Desa satu yang lain cukup dekat juga.

Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, dimulai pada bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Oktober 2003.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yang diwawancari sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Untuk lebih jelasnya secara rinci disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 2. Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1.	Dinas Kehutanan	4 orang
2.	Balai Taman Nasional Tanjung Puting	6 orang
3.	Kecamatan Kumai	2 orang
4.	Kelurahan Candi	1 orang
5.	Kelurahan Kumai Hulu	1 orang
6.	Kelurahan Kumai Hilir	1 orang
7.	Desa Kapitan	1 orang
8.	Masyarakat	3 orang
9.	Tokoh Masyarakat	4 orang
10.	Lembaga Swadaya Masyarakat	4 orang
11.	Polres Kabupaten Kotawaringin Barat	1 orang

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan metode observasi dan wawancara, langsung di 4 (empat) lokasi penelitian kepada beberapa narasumber yang telah disebutkan di atas.

3.2.2.1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati (Hadi, 1997). Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung (*direct observation*) dan peneliti menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subyek peneliti bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa yang di lihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran yang utuh tentang obyek yang diteliti. Obyek yang diamati adalah kehidupan masyarakat dalam keseharian misalnya pergaulan dan komunikasi di antara mereka, aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dan keadaan lingkungan fisik kelurahan dan desa meliputi jalan, rumah dan bangunan serta fungsinya.

3.2.2.2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara tidak terstruktur (*unstructured interviews*) terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang terkait langsung dengan keberadaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Juga terhadap tokoh kunci (*key informan*) dan wawancara informal (*informal interviews*) (Kumar, 1996 dalam Kamasan, 2002). Wawancara dengan tokoh kunci dilakukan untuk menggali respon masyarakat terhadap kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting secara mendalam karena tokoh tersebut mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang topik penelitian. Tokoh kunci bisa lurah/kepala desa aparat Kecamatan, Cabang Dinas Kehutanan dan aparat Balai Taman Nasional Tanjung Puting di lokasi penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap masyarakat ke empat (4) lokasi penelitian. Dengan wawancara ini digali tentang respon masyarakat terhadap kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Data yang dihasilkan dalam wawancara tersebut merupakan data primer yang bersifat kualitatif.

Narasumber di bagian masyarakat adalah aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat itu sendiri yang sehari-harinya bekerja dan memanfaatkan hutan Taman Nasional Tanjung Puting di 4 (empat) lokasi penelitian. Sedangkan narasumber dari aparat Pemda adalah, aparat Dinas Kehutanan, Balai Taman Nasional, aparat Kecamatan di tempat lokasi penelitian.

3.2.3. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah: penelitian yang memberikan gambaran hubungan-hubungan logis untuk menerapkan suatu fenomena sosial. (Masri Singarimbun, 1995). Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sedangkan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Maleong, 1997). Data kualitatif hasil penelitian respon stakeholder terhadap kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting secara deskriptif disesuaikan dengan rancangan alur pikir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Umum Masyarakat Kecamatan Kumai

Kecamatan Kumai berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, terletak 15 Km dari ibu kota Kabupaten. Monografi wilayah 70% datar sampai berombak dan 30% berombak sampai berbukit. Luas wilayah Kecamatan Kumai 445.600 Ha atau 4.456,00 Km², memiliki 31 Desa/Kelurahan dan Dusun. Luas wilayah secara terperinci dapat di lihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Luas Wilayah Kecamatan Kumai Menurut Rincian Peruntukan/Penggunaan Tanah

No	Peruntukan/Penggunaan Lahan	Luas (ha)	%
1	Tanah Sawah :		
	▪ Irigasi sederhana	296	0,20
	▪ Tadah Hujan	3.588	2,46
	▪ Pasang surut	400	0,27
2	Tanah Kering	8.000	5,45
3	Tanah Basah	2,5	0,005
4	Tanah Perkebunan		
	▪ Perkebunan Negara	-	-
	▪ Perkebunan Swasta	3.160	2,15
5	Fasilitas Umum		
	▪ Lapangan Olah Raga	33	0,02
	▪ Taman Rekreasi	430.048	89,40
	▪ Jalur Hijau	50	0,03
	▪ Kuburan	22,5	0,015
J u m l a h		445.600	100,00

Sumber: Kumai Dalam Angka, 2001

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas umum berupa taman rekreasi seluas 89,40% dari luas wilayah Kecamatan Kumai, dan di dalamnya ada kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting.

Penduduk sebagian besar pendatang terutama suku Madura, Jawa, Bugis dan sebagian lagi suku asli yaitu Melayu. Mereka sudah ada sekitar 90 tahun yang lalu. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Kumai disajikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kecamatan Kumai

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	1.150	4.374	9.542
5 – 9	6.132	4.467	11.599
10 – 14	5.271	4.464	9.735
15 – 19	3.417	2.859	6.276
20 – 24	2.720	2.865	5.585
25 – 29	3.290	3.331	6.621
30 – 34	2.767	2.518	5.285
35 – 39	2.735	2.046	4.781
40 +	1.732	1.261	2.993
J u m l a h	33.232	28.185	62.417

Sumber: Kumai Dalam Angka, 2001

Melihat Tabel 4 di atas penduduk Kecamatan Kumai lebih dari 60% tergolong usia produktif (usia produktif dari usia 15-65 tahun). Sedangkan sisanya tergolong nonproduktif (usia nonproduktif usia 0-14 tahun), terdiri dari laki-laki 33.232 jiwa dan perempuan 28.185 jiwa.

Di satu sisi jumlah penduduk yang banyak justru aset yang potensial bagi pembangunan, jika penduduk tersebut mampu diarahkan serta dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan. Di sisi lain, jumlah penduduk yang banyak justru merupakan beban pembangunan. Kendala yang sering

dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berikut Tabel 5 komposisi penduduk menurut mata pencaharian.

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persen (%)
1.	Petani	9.986	27,66
2.	Nelayan	3.587	9,94
3.	Pengusaha	65	0,18
4.	Pengrajin/industri Kecil	132	0,37
5.	Pedagang	3.679	10,19
6.	Transportasi	102	0,28
7.	Pegawai Negeri Sipil	803	2,22
8.	TNI/POLRI	89	0,25
9.	Purnawirawan TNI/POLRI	50	0,14
10.	Peternak	15.582	43,16
11.	Lain-lain	2.025	5,61
Jumlah		36.100	100,00

Sumber: Kumai Dalam Angka, 2001

Melihat Tabel 5 di atas mata pencaharian terkonsentrasi pada sektor pertanian, meliputi sub sektor peternakan 43,16% dan sub sektor tanaman pangan 27,66%.

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kumai, dapat di lihat pada Tabel 6 di bawah:

Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Di Kecamatan Kumai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum sekolah	5.876	8,17
2	Tidak tamat sekolah	11.998	16,68
3	Tamat SD/Sederajat	16.182	22,50
4	Tamat SLTP/Sederajat	19.128	26,60
5	Tamat SLTA/Sederajat	18.625	25,90
6	Tamat Akademi/Sederajat	85	0,12
7	Tamat PT/Sederajat	35	0,05
Jumlah		71.929	100,00

Sumber: Kumai Dalam Angka, 2001

Bila dilihat dari Tabel 6 di atas jumlah penduduk yang ada sebesar 71.929 jiwa, Sebagian kecil penduduk (0,12% atau 85 jiwa) menamatkan pendidikan tingkat Akademi/ sederajat dan 0,05% atau 35 jiwa yang mampu menamatkan perguruan tinggi. Pada umumnya penduduk hanya tamat SD sampai SLTA bahkan dan tidak tamat sekolah (16,68% atau 11.998 jiwa).

4.2. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting

4.2.1. Sejarah Penetapan Kawasan

Taman Nasional Tanjung puting, awalnya terdiri dari Cagar Alam Kotawaringin dan Suaka Margasatwa Sampit dengan luasan total 305.000 ha. Cagar Alam Kotawaringin seluas \pm 100.000 ha berdasarkan "Zelbestuur Van Kotawaringin" Nomor 24 tanggal 13 Juni 1936; dan Suaka Margasatwa Sampit seluas \pm 250.000 ha berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral (Pemerintah Kolonial Belanda). Kedua kawasan konservasi tersebut dikenal dengan Suaka Alam/Margasatwa Kotawaringin-Sampit, dan kemudian setelah itu dikenal sebagai Suaka Margasatwa Tanjung Puting

Melalui Surat Menteri Pertanian No. 736/MENTAN/1982 kawasan Suaka Margasatwa Tanjung Puting dinyatakan sebagai calon Taman Nasional. Kawasan ini mencakup kawasan hutan produksi seluas 54.900 ha yang menjadi konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Hezubasah.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/84 tanggal 12 Mei 1984 ditetapkan Unit Pelaksanaan Teknis Taman Nasional Tanjung Puting, yang bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 46/Kpts/VI-Sek/1984 tanggal 11 Desember 1984, Tanjung Puting dinyatakan sebagai Taman Nasional dengan wilayah kerja (kawasan) seluas 300.040 ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 687/Kpts-II/1996 kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting diperluas menjadi 415.040 ha, yang meliputi:

- Suaka Marga Tanjung Puting : 300.040 ha
- Hutan Produksi : 90.000 ha
- Kawasan Perairan : 25.000 ha

(Sumber: Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2002)

4.2.2. Kondisi Geografis Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting

Secara geografis Taman Nasional Tanjung Puting terletak di antara 111°50' - 112°15' Bujur Timur dan 2°35' - 2°20' Lintang Selatan, dengan luas 415.040 ha. Kawasan mencakup sebagian besar semenanjung alluvial yang berawa-rawa di antara Teluk Kumai sampai Sungai Seruyan dan dibatasi oleh Sungai Sekonyer, batasan buatan yang berjarak antara 5–10 km dari Sungai Seruyan di bagian timur serta dengan dengan batas-batas sebagai berikut: di sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan PT. Wana Sawit Subur Lestari, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Timur berbatasan dengan PT. Bina Samaktha, di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Kumai.

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim Schimdt dan Ferguson Taman Nasional Tanjung Puting termasuk iklim A dengan $Q = 0 - 14\%$ dengan kelembapan udara musim hujan bervariasi antara 55%-98%, sedangkan curah hujan rata-rata 100 hari. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting memiliki iklim ekuatorial (tropis) dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Pengaruh angin barat daya sangat kecil pada sebagian besar waktu, namun kadang-kadang juga sangat dirasakan. Suhu maksimum bervariasi dari 31°-33°C dan suhu minimum bervariasi dari 18°-21°C, di mana suhu yang lebih dingin terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Meskipun demikian, iklim di Taman Nasional Tanjung Puting tidak dapat dikatakan "muson".

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kerusakan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting

Potensi flora dan fauna yang terkandung di dalam hutan Taman Nasional Tanjung Puting sangat beraneka ragam, baik jenis maupun bentuknya dengan berbagai tipe ekosistem tempat penyebaran yang sampai saat ini belum banyak diketahui keberadaannya.

Musim kemarau yang panjang pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang sangat besar selama beberapa bulan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kebakaran terjadi sebagian diakibatkan oleh pembukaan lahan perladangan oleh penduduk dan di sisi lain sengaja dibakar karena adanya persaingan lokasi penebangan. Kebakaran hutan telah menimbulkan kerusakan hutan yang luar biasa serta membunuh, melukai dan mengusir ratusan satwa.



Foto. Dok. Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2002

Gambar 2. Kerusakan hutan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting

Kelembaban udara hutan tropis dalam keadaan normal (alami) mampu mengendalikan asap kebakaran. Namun dikarenakan perusahaan *logging* banyak menyisakan sampah-sampah kering dan perusahaan perkebunan kelapa sawit membuka lahan dengan pembakaran, serta ditambah lagi adanya masalah yang sudah lama menyita pemikiran Pemerintah daerah dan berbagai kalangan di daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai penebangan liar di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius.

Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Lusman Pasaribu (13 Juni 2003) menyatakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting tinggal sekitar 30% yang masih bagus. Hal ini terjadi karena penggundulan hutan yang sistematis demi keuntungan jangka pendek, penebangan liar, penambangan emas tanpa ijin (PETI), pembukaan lahan perkebunan, kebakaran hutan telah merusak lingkungan hidup di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting dengan dampak sosial yang sangat cepat.

Tabel 7. Alokasi Luas Kerusakan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting

No	Sumber Kerusakan	Luas Areal Kerusakan (ha)	Persen
1.	Illegal logging	136.963,2	33%
2.	Perambahan	29.052,8	7%
3.	Penambangan Emas	41.504	10%
4.	Kebakaran	83.008	20%
Jumlah		290.528	70%

Sumber: Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2002

Kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting akibat penebangan liar tidak saja dilakukan oleh penduduk sekitar hutan yang umumnya hanya mempergunakan peralatan kampak tradisional, melainkan juga karena *illegal logging* oleh perusahaan raksasa, yang mempergunakan peralatan berat, sehingga laju deforestasi di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting tak

terhindari lagi. Kenyataan seperti ini disaksikan sendiri oleh Menteri Kehutanan M. Prakosa yang belum lama berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting (3 April 2003). Menteri Kehutanan M. Prakosa terkejut menyaksikan sekitar 70% areal Taman Nasional Tanjung Puting rusak dan melihat adanya sejumlah rel panjang yang diduga merupakan prasarana transportasi untuk mengangkut log (pohon yang sudah ditebang).

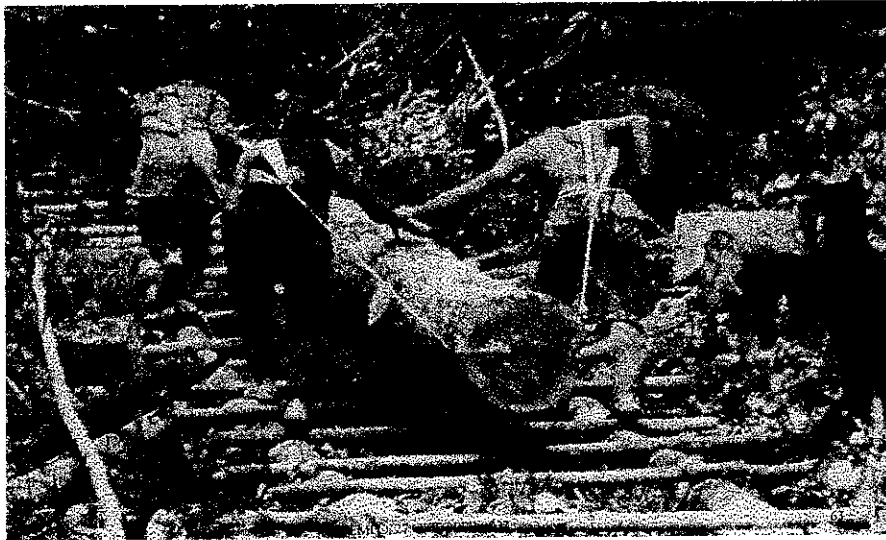


Foto. Dok. Hasil Tim Investigasi TEMPO, 2002

Gambar 3. Prasarana transportasi rel digunakan mengeluarkan kayu dari hutan.

Taman Nasional Tanjung Puting merupakan target utama penebangan kayu ramin (*Gnostylus spp*). Sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan meningkat dengan adanya perdagangan kayu-kayu ilegal, khususnya perdagangan kayu ramin, namun dampak kondisi lingkungan hutan menjadi rusak bahkan hilang kelestariannya kurang disadari. Saat ini telah diberlakukan moratorium larangan penebangan dan perdagangan kayu ramin yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 127/Kpts-V/2001. Kesepakatan pemberantasan dan kampanye ramin dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam dan luar negeri juga dilakukan dalam mengatasi kerusakan populasi kayu ramin.

5.2. Respon Stakeholders Terhadap Hutan Taman Nasional Tanjung Puting

5.2.1. Respon Pemda

Berkaitan dengan peranserta pihak lain dalam pengelolaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, pihak Balai Taman Nasional Tanjung Puting selaku pengelola kawasan memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan bina cinta alam dan pembentukan kader konservasi kepada masyarakat guna penyebaran informasi arti pentingnya sumberdaya alam beserta ekosistemnya.
2. Membuat program pengembangan daerah penyangga dari desa-desa sekitar Taman Nasional Tanjung Puting.
3. Mengusulkan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai obyek penelitian, sehingga potensi kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dapat diketahui secara rinci yang pada akhirnya akan dikelola sebagai "Database" guna penentuan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Nasional Tanjung Puting.
4. Membentuk komitmen dan tekad semua pihak (aparatur Pemerintah, aparat keamanan dan aparat masyarakat) dalam menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting. (Balai Taman Nasional Tanjung Puting Departemen Kehutanan, 2003)

Secara fungsional dan struktural tanggung jawab serta kewewenangan pihak Pemda Kotawaringin Barat dalam pengelolaan hutan hanya dapat mendukung kebijakan dan pelaksanaan pihak Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Seperti masalah penjagaan dan pengamanan hutan, walaupun pihak Balai Taman Nasional Tanjung Puting memiliki aparat jagawana dengan prioritas kerja mengawasi, menjaga dan mengamankan kawasan hutan, dan di areal kawasan hutan telah dibentuk pos-pos penjagaan, pihak Pemda melalui Kantor Dinas Kehutanan bersama Polres kotawaringin Barat memberikan dukungan

pengamanan di luar areal kawasan hutan. Ada kalanya juga dilakukan operasi bersama/gabungan dengan melibatkan aparat TNI dan Polda Kalimantan Tengah.



Foto, Dok. Sofian Winoto, 2003

Gambar 4. Pos Penjagaan aparat Jagawana Balai Taman Nasional Tanjung Puting

Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat sangat prihatin dengan kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan informasi Bapak Hasyim Syahroni selaku ajudannya (17 Juni 2003). Bupati menunjukkan keprihatinannya dengan mengatakan bahwa aksi penjarahan kayu di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting membuat kesal karena meski sudah dilakukan penjagaan yang ketat, tetap saja masyarakat melakukan penebangan liar. Seperti terlihat pada gambar 5 berikut memperlihatkan ketidak pedulian masyarakat.



Foto, Dok. Sofian Winoto, 2003

Gambar 5. Salah satu pondok para pencuri kayu diketumkan tim pada saat operasi gabungan

Pemerintah daerah sebagai wujud dukungan dan keprihatinan terhadap kondisi hutan Taman Nasional Tanjung Puting telah menunjukkan kontribusinya dengan melakukan beberapa upaya konkrit (tindakan) sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif

Untuk mendukung penjagaan dan pengamanan kawasan hutan berdasarkan pernyataan Inseptur Dua (Ipda) H.Gunadi (20 Mei 2003), Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat bersama Polres berkoordinasi melakukan himbauan melalui spanduk dan pamflet yang isinya melarang memasuki kawasan Taman Nasional Tanjung Puting tanpa ijin disertai dengan pernyataan ancaman hukuman penjara dan denda. Lebih jauh lagi Pemda melalui pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Bapak Darajat (3 Juni 2003) mengatakan pihak Pemerintah Daerah telah mengeluarkan peraturan larangan perdagangan dan pemakaian kayu yang diambil dari Taman Nasional Tanjung Puting. Selain itu Sekretaris Kecamatan Kumai Bapak Soemarno menambahkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan langkah preventif melalui aparat Kecamatan Kumai untuk melakukan

'inclove' (pengeluaran lokasi) dan penataan luas lokasi penduduk yang mendiami kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting.

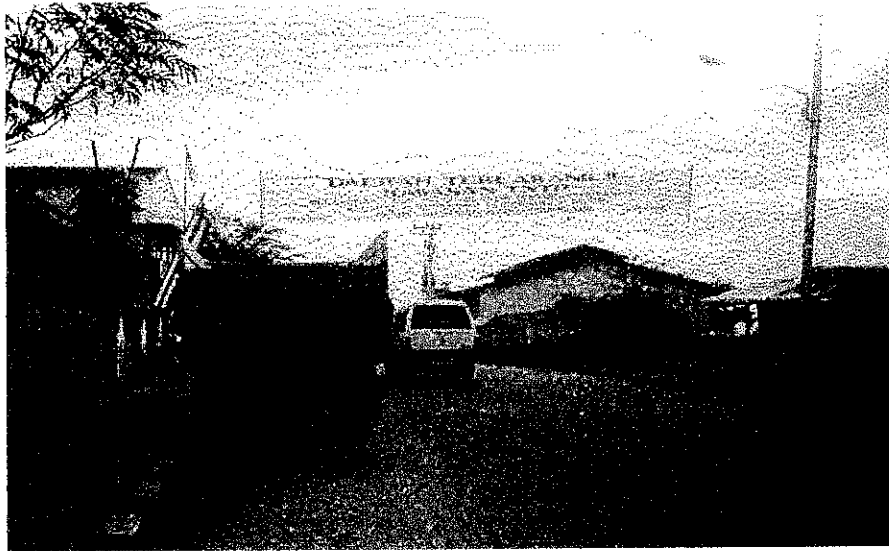


Foto. Dok. M. Tri Deslantoro, 2003

Gambar 6. Himbauan Pemda dan Polres Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bentuk spanduk di jalan

b. Tindakan Kuratif

Sekretaris Kecamatan Kumai Bapak Soemarno (15 Mei 2003) menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat serius dalam mendukung pengelolaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu untuk Tahun Anggaran (TA) 2002 telah dialokasikan anggaran Rp 2 miliar untuk mengembangkan usaha tambak udang sebagai 'kompensasi' bagi masyarakat yang pekerjaannya sangat tergantung dari penebangan kayu hutan. Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penebangan kayu di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, menurut Bapak Soemarno Pemda telah menjalankan program bantuan kredit Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pantai (PEMP) bagi masyarakat dalam pengembangan pertanian, peternakan, perikanan laut, tambak, dan lain-lainnya. Hasil yang telah dicapai sampai tahun 2004 dijelaskan oleh Bapak Soemarno sebagai berikut:

- a. Tahun luas panen sawah \pm 600 ha / 2,6 ton/ha
- b. Tahun luas panen sawah \pm 780 ha / 3,2 ton/ha
- c. Luas tambak ikan bandeng/udang sampai dengan tahun 2004 \pm 40 ton.

(Sumber data: Kantor Kecamatan Kumai 2004)

Bapak Syafruddin (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan, (3 Juni 2003) menyampaikan, Pemda telah memberikan dana sebesar Rp 300 juta untuk membantu mengatasi kerusakan yang terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Bapak Saifudin menambahkan bahwa rehabilitasi lahan selama ini hanya meliputi daerah sekitar pantai sebagai 'sabuk hijau' untuk mengatasi terjadinya erosi/abrasi pantai.

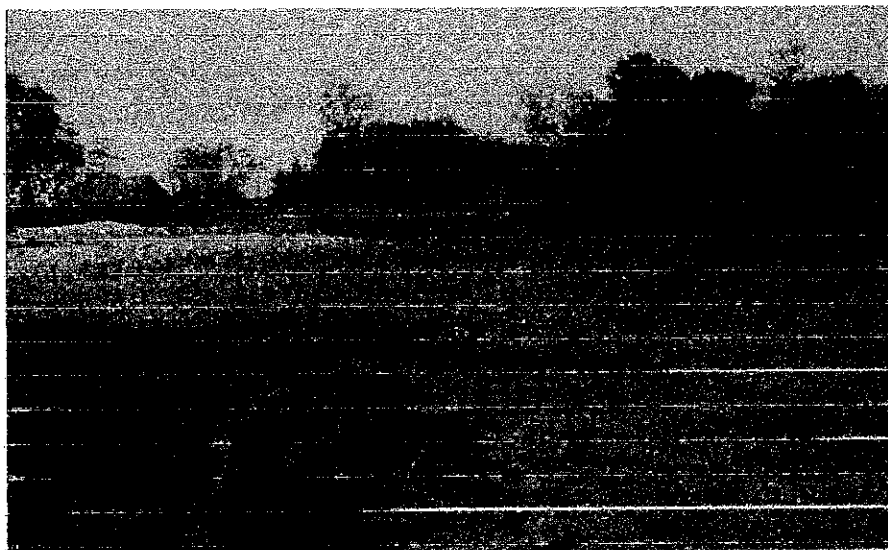


Foto. Dok. M. Tri Desiantoro, 2003

Gambar 7. Penanaman Mangrove sebagai bentuk penghijauan di pinggiran pantai hutan Taman Nasional Tanjung Puting

c. Tindakan Represif

Dinas Kehutanan Pemda tidak memiliki kewenangan di dalam kawasan hutan. Bapak Saifudin (5 Juni 2003) salah satu staf bagian konservasi Dinas kehutanan menyatakan bahwa wewenang kantor Dinas hanya sebatas pengawasan dan pengamanan keluar masuknya kayu di luar kawasan

Taman Nasional Tanjung Puting. Namun begitu lebih lanjut dikatakannya bahwa dinas kehutanan membantu melakukan operasi rutin ataupun operasi gabungan dengan aparat Balai Taman Nasional Tanjung Puting serta aparat Polisi Resort dan aparat Kodim.



Foto. Dok. M. Tri Desiantoro, 2003

Gambar 8. Kayu yang ada di stapel dari kawasan hutan TNTP disita disaat operasi Wanalaga I tahun 2003

Berdasarkan pernyataan Bapak Taupik (3 Juni 2003) aparat Jagawana Balai Taman Nasional Tanjung Puting, operasi wanalaga yang pernah dilakukan menimbulkan dampak positif yaitu pencurian kayu berkurang sebesar 100% dari sebelumnya. Bahkan hasil operasi Wanalaga tahun 2000 dipandang sukses karena dapat menangkap dan menetapkan 98 orang yang terlibat praktik *illegal logging*. Naharudin (3 Juni 2003) Staf Teknisi Balai Taman Nasional Tanjung Puting menambahkan, operasi Wanalaga tahun 2003 digelar lagi oleh Mabes Polri dan Mabes TNI yang dipimpin langsung Danrem 102/PP Kol Hatta Safrudin dan berhasil mengamankan ribuan meter kubik kayu gelap, 2 tongkang dan 3 *tugboat*.

Hal yang disayangkan dari hasil upaya tindakan tersebut di atas kurang ada tindak lanjut proses hukumnya. Menurut Sofian Winoto (17 Mei 2003) salah satu aparat Jagawana Dinas Kehutanan, ada dugaan oknum aparat melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) ataupun diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu yang sangat merugikan negara.

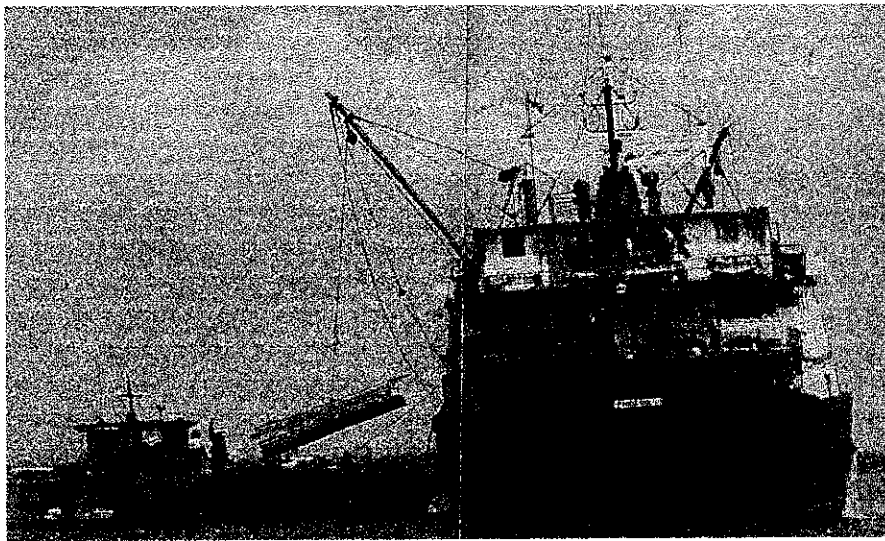


Foto. Dok. Hasil Tim Investigasi TEMPO, 2003

Gambar 9. Kegiatan loding (muat kayu) di tengah laut supaya tidak terlihat oleh aparat.

Walaupun begitu kepercayaan serta tekad menjaga dan mengamankan kawasan hutan masih cukup dimiliki oleh aparat. Hal ini didukung dengan pernyataan Naharudin yang mengutip pernyataan Dantim (Komandan Tim) Opsus (Opertasi Khusus) Wanalaga I - 2003 Mabes Polri Brigjen Polisi Herman S. bahwa kasus-kasus *illegal logging* yang sulit dijerat hukum akan dikikis habis, siapa pun orangnya dan apa pun pangkatnya.

M. Sadhi, S.H (Aparat Balai Taman Nasional Tanjung Puting Bagian Tata Usaha) mengatakan Pemda sejak adanya Taman Nasional Tanjung Puting tidak memiliki kepedulian yang tinggi sampai kawasan hutan tersebut rusak, sampai adanya operasi Wanalaga yang dilaksanakan oleh mabes Polri, karena operasi tersebut langsung turun dan tanpa adanya pemberi tahuan sebelumnya kepada

pihak Gubernur dan Bupati setempat maka setelah itu mereka ada pedulinya dengan keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting. Kaitannya dengan otonomi daerah karena sebelumnya dana untuk memasuki kawasan Taman Nasional Tanjung Puting sebesar 70% masuk Kas Pemerintah daerah dan 30% masuk ke Balai Taman Nasional. Ini terkait dengan tiap tahunnya wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting pada tahun 2002 berjumlah 2.786 orang terdiri dari 2.380 orang wisatawan Asing dan 506 orang wisatawan Domestik. (Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2002)

5.2.2. Respon Masyarakat

Menurut Bapak Said Hasyim (Sekretaris Kelurahan Kumai Hilir, 12 Juni 2003) kebanyakan penduduk di sekitar kawasan hutan bekerja sebagai perambah hutan. Lebih lanjut, Bapak Arbain Djapari (Sekretaris Kelurahan Kumai Hulu, 12 Juni 2003) mengatakan penduduk ada juga yang bekerja sebagai pengrajin atau membuat atap dari daun nipah, kebanyakan dilakukan oleh para wanitanya sementara yang laki-laki mencari daun nipah. Untuk menambah pendapatan, penduduk menebang kayu hutan karena hasil hutan terutama kayu ramin, pulai dan nyatuh diperdagangkan dengan harga cukup tinggi. Ditambahkan oleh Bapak Arbain Djapari sebenarnya ada salah satu lokasi yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting yang bisa dikembangkan sebagai obyek wisata dan bisa juga alternatif untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Data yang diperoleh dari Balai Taman Nasional Tanjung Puting, menyebutkan bahwa wisata di daerah Danau Burung, burung-burung yang terdapat di daerah itu yaitu burung Sindanglawe (*Ciconia stormil*), termasuk burung yang paling penting di Taman Nasional Tanjung Puting, termasuk salah satu dari 20 jenis burung bangau yang paling langka di dunia serta dimasukkan

dalam katagori “terancam kepunahan” oleh IUCN. Dikenal sebagai burung soliter di hutan primer dan rawa-rawa. Sindanglawe sering terlihat “sendirian” maupun dalam kelompok, di tepian sungai-sungai yang terdapat di dalam kawasan terutama di daeah Danau Burung. Dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya di Indonesia yang terdapat jenis burung ini, Taman Nasional Tanjung Puting termasuk yang memiliki densitas (kepadatan) paling besar. Sifat ekologis jenis burung ini sangat mirip dengan bagau hitam (*black stotk* atau *Ciconia nigra*) yang sering memadati hutan primer di Eurasia dan daerah jelajahan jenis ini “sympatrr” dengan “wooly necked stork” (*Ciconia episcopus*) yang tampaknya lebih berafiliasi dengan daerah-daerah terbuka. Tidak banyak diketahui mengenai makanan Sindanglawe ini, namun dikatakan bahwa katak dan cacing termasuk yang dimakan burung Sindanglawe. Di luar Kalimantan dan Sumatera, jenis burung ini diketahui ada di Malaysia dan Thailand. Estimasi terakhir jumlah populasi jenis burung ini di Indonesia menunjukkan angka 300. (Silvius and verheugt, 1992 dalam Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2001)

Selain burung yang disebutkan di atas di Danau Burung juga ada burung yang disebut dengan burung Raja Udang Paruh Bangau (*Pelargosis capensis*), jenis burung ini juga merupakan jenis burung yang dilindungi yang keberadaannya sudah jarang kita jumpai di luar Pulau Kalimantan. Di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting Burung Raja Udang ini sering terlihat pada siang hari dan sore hari melintas jalur Sungai Sekonyer dan terkadang terlihat seakan “berlomba” dengan klotok (alat transportasi air di kawasan TNTP) yang melewati Sungai Sekonyer. Dan biasanya hanya terbang sendiri untuk mencari makan, ini hanya terdapat di daerah Danau Burung dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. (Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2001).



Foto. Dok. Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2002

Gambar 10. Salah satu obyek wisata yang akan dikembangkan yaitu di danau burung oleh pihak Balai Taman Nasional Tanjung Puting

5.2.2.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan dan Kerusakan Taman Nasional Tanjung Puting

Menurut sekretaris Kelurahan Candi Bapak Matruki (10 Mei 2003) sebenarnya sebagian masyarakat tahu dengan adanya larangan, merusak, memasuki kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, tapi karena kebutuhan ekonomi, selain kebutuhan ekonomi sebab lainnya adalah karena sumber daya mereka rendah jadi sulit untuk memahami larangan dari pemerintah dan himbauan. Dilain pihak karena mereka juga tidak ada lagi alternatif pekerjaan yang bisa dilakukan.

Karena sosialisanya yang kurang sehingga mereka melanggar larangan menebang kayu maupun melakukan penambangan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, apalagi memasuki kawasan tanpa ijin. Berdasarkan pendekatan dan wawancara kepada masyarakat di lokasi sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, para narasumber berpendapat

pemerintah daerah maupun pihak pengelola Taman Nasional kurang dapat mensosialisasikan pentingnya aturan dan kebijakan larangan tersebut.

Kaspul Anwar (Mantan Kepala Desa Sungai Kapitan, 8 Mei 2003) selaku tokoh masyarakat menyayangkan terjadinya kerusakan kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Hal tersebut sebenarnya tidak harus terjadi, karena Taman Nasional Tanjung Puting merupakan aset pendapatan daerah dan aset nasional, bahkan dunia internasional memiliki respon sangat tinggi dengan terjadinya kerusakan itu. Bapak Kaspul juga menyatakan bahwa selama ini keberadaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting telah meningkatkan kondisi ekonomi desa-desa di sekitar kawasan. Selain itu ditambahkan oleh H. Kasrani (10 Mei 2003), tokoh masyarakat dan salah satu anggota DPRD Kotawaringin Barat, terjadi transformasi sosial-budaya yang positif dimana penduduk desa yang sebelumnya tidak mengenal dan tidak bisa berbahasa asing (bhs. Inggris) menjadi bisa dengan adanya turis manca negara.

5.2.2.2. Peranserta dan Harapan Masyarakat Terhadap Taman Nasional Tanjung Puting

Menurut salah seorang anggota masyarakat setempat, Musa (6 Mei 2003), menilai bahwa masyarakat tidak terlibat atau sedikit sekali terlibat diajak ikut serta dalam pemeliharaan Taman Nasional Tanjung Puting. Sehingga wajar kalau masyarakat kurang peduli terhadap kelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting.

H. Surinuddin (tokoh masyarakat Madura yang ada di kecamatan Kumai, 12 Mei 2003) mengatakan masyarakat memandang pencurian dan kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting terjadi akibat kurang tanggapnya Pemerintah daerah dan pusat, "Kami-kami ini sebagai tokoh masyarakat sedikit sekali diikutsertakan memecahkan permasalahan tersebut."

Baihaki (13 Juni 2003) seorang tokoh muda menilai koordinasi dan sosialisasi Pemerintah dalam melakukan tindakan yang melibatkan masyarakat kurang. Menurutnya, masyarakat khususnya yang biasa bekerja di hutan (penebang liar) kurang diajak memecahkan jalan keluar bagaimana, merubah cara kerja mereka supaya pendapatan ekonomi tetap bisa meningkat tanpa harus mencuri kayu.

5.2.3. Respon Pengusaha

Silvariani (9 Oktober 2003) salah seorang pedagang kayu lokal mengatakan pihak pengusaha kayu dipandang Pemda paling berperan terhadap rusaknya hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Hal ini didukung pendapat Suriansyah (18 Oktober 2003) pengusaha pelayaran rakyat, yang menerangkan bahwa banyak perusahaan kayu setengah jadi (*sawmill*) yang tutup (berhenti operasional) setelah diberlakukan larangan menebang atau mengambil kayu dari kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Sehingga berdampak pada usaha pelayaran yang dikelolanya mengalami kemunduran.

Dijelaskan oleh Silvariani, bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan limbah (*Clud Palem Oil*) CPO-nya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, karena telah mencemari Sungai Sekonyer dengan terjadinya kematian ikan-ikan dan bintang air lainnya.

LSM Yayorin menyebutkan ada 2 (dua) kolam jebol, sedangkan kadar air Sungai Sekonyer yang tercemar oleh CPO itu kadar BOD nya sekitar 15.000 mg/l sehingga debit air Sungai Sekonyer tidak mampu mengencerkan limbah. Sedangkan kerugian moril maupun materil ditaksir sekitar Rp. 1.652.125.000 (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). (Sumber data: LSM Yayorin, 2003)

H. Malik (25 Oktober 2003) salah satu pengusaha kecil (cukong) menerangkan bahwa masyarakat mengerti larangan memasuki kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, namun karena kebutuhan ekonomi di mana saat pekerjaan sebagai pemborong tidak mencukupi, mereka menebang pohon di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting karena hasilnya cukup banyak dan menggunakan modal sedikit.

5.2.4. Respon LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

5.2.4.1. Persepsi Terhadap Kebijakan dan Kerusakan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap Taman Nasional Tanjung Puting yaitu *Conservation Internasional Indonesia (CII)*, dan Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin). Kedua lembaga tersebut mendukung kebijakan pengelolaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting dengan aktif mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya hutan bagi kehidupan.

Permasalahan kerusakan lingkungan Taman Nasional Tanjung Puting tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah, menurut A. Yani (Yayorin Staf bina masyarakat 20 Mei 2003) penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Binti Brindamour (Yayorin staf konservasi 22 Mei 2003) bahwa terciptanya kelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting tidak cukup dibebankan kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah dan pusat. Peraturan dan kebijakan serta ancaman yang telah dikeluarkan kurang diikuti dengan penegakan hukum yang kuat sehingga penerapan tindakan di lapangan mengalami banyak hambatan.

Penilaian Gatot. M (LSM CII, 27 Mei 2003) agak berbeda dalam menanggapi permasalahan lingkungan di Taman Nasional Tanjung Puting, kesulitan perekonomian keluarga karena krisis ekonomi yang terjadi (1997)

menjadikan masyarakat melakukan penebangan, padahal mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting sebenarnya adalah nelayan dan berladang.

5.2.4.2. Peranserta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Taman Nasional Tanjung Puting terkenal dengan satwa orangutan (*Pongo pygmaeus*). Yayasan orangutan lahir berawal dari keprihatinan sekelompok orang terhadap terus bertambahnya kerusakan hutan tropika yang secara langsung maupun tidak langsung akan memusnahkan satwa yang ada di dalamnya. Kelompok tersebut peduli terhadap nasib kehidupan binatang yang kehilangan tempat hidupnya di hutan tropik, maka dibuatlah sebuah lembaga yang diberi nama "Yayasan Orangutan Indonesia". Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin), lebih banyak peduli kepada satwa orangutan yang hampir punah akibat kerusakan habitat karena pencurian kayu dan kebakaran hutan.

Yayasan orangutan selain bergerak di bidang penyelamatan orangutan juga memberikan pendidikan berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah, masyarakat, LSM, remaja masjid, dan sasaran lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan penelitian yang di lakukan oleh Prof. DR. Birutte M. F. Galdikas Bohap sejak tahun 1971, yang menyangkut masalah perilaku kehidupan orangutan dan hubungan timbal balik terhadap hutan sebagai tempat tinggalnya.

Conservation Internasional Indonesia (CII) memiliki hubungan kerjasama dengan Yayorin dalam rangka penyelamatan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. CII lebih banyak bergerak dalam bidang konservasi hutan, selain itu juga melakukan pelatihan diantaranya adalah mengadakan "Pelatihan Manajemen Organisasi dan Usaha", serta pengembangan sumber daya masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

5.3. Analisis Respon Stakeholder

5.3.1. Analisis Respon Pemda

Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebenarnya telah banyak melakukan tindakan dalam merespon kerusakan kawasan hutan Tanjung Puting baik dalam bentuk bantuan dana untuk rehabilitasi hutan (Rp 300 Juta), program himbauan, operasi pengamanan dan penjagaan, diversifikasi usaha dalam pengembangan ekonomi masyarakat, serta kebijakan dalam bentuk peraturan, namun begitu kerusakan hutan terus berlanjut. Di sisi lain masyarakat sebenarnya juga menyadari keadaan kerusakan hutan.

Ada kesenjangan penanganan dan pengelolaan kerusakan kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Berdasarkan respon di atas kerusakan hutan diduga karena akibat dari perbedaan sudut pandang terhadap keberadaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Sudut pandang pemerintah daerah lebih menekankan aspek perlindungan kawasan hutan sebagai aset daerah, sementara masyarakat lebih pada aspek pemanfaatan kawasan hutan sebagai aset ekonomi masyarakat sendiri, di mana aspek kepentingan masyarakat ini kurang diperhatikan oleh Pemda dengan kurang dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Sebenarnya melalui pihak Balai Taman Nasional Tanjung Puting telah diupayakan pemecahan terhadap perbedaan kepentingan tersebut di atas yaitu dengan mengelola Taman Nasional Tanjung Puting berdasarkan sistem zonasi potensi yang dimiliki:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Zona Inti | : 229,088 ha |
| 2. Zona Rimba | : 81,552 ha |
| - Daratan | : 65,702 ha |
| - Perairan | : 15,850 ha |

3. Zona Pemanfaatan

- Zona Pemanfaatan Intensif : 1000 ha
- Zona Pemanfaatan Khusus : 4250 ha
- Zona Pemanfaatan Tradisional : 9961 ha
- Zona Rehabilitasi : 89189 ha

(Sumber : *Conservation Internasional Indonesia (CII)*, 2003)

Namun begitu pada kenyataannya sistem pengelolaan ini tidak diindahkan oleh masyarakat dan barangkali juga tidak sepenuhnya dijalankan oleh pihak pengelola kawasan hutan, karena terbukti kerusakan kawasan hutan tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem zonasi tersebut kurang memenuhi kepentingan masyarakat sekitar atau kurang tersosialisasi dan terkoordinasi sehingga masyarakat kurang menyadari arti sistem zonasi.

Perbedaan atau kesenjangan seperti diuraikan di atas nampaknya perlu pendekatan dari aspek teknis (pelaksanaan) bukan aspek strategis (kebijakan). Tinjauan aspek teknis berdasarkan data respon kerusakan kawasan hutan antara pihak pemerintah daerah dengan pihak masyarakat memperlihatkan adanya hambatan-hambatan yang perlu diselaraskan atau di koordinasikan.

5.3.2. Analisis Respon Masyarakat

Nilai ekonomi hasil hutan sangat tinggi. Pemahaman tingginya nilai hasil hutan ini mendorong adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat melalui sumber daya hutan. Keadaan ini semakin kondusif dengan tidak terbentuknya atau terciptanya pemenuhan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi lain yang tidak memanfaatkan hasil hutan. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang menyatakan "masyarakat mengerti larangan memasuki kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, namun karena kebutuhan ekonomi di mana saat pekerjaan lain tidak mencukupi, mereka

mengarap hutan karena hasilnya cukup banyak dengan modal sedikit.” Fenomena ini menunjukkan adanya ketergantungan hidup (ekonomi) masyarakat terhadap hasil hutan yang besar.

Manfaat positif keberadaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa-desa sekitar kawasan hutan kurang diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap keprihatinan tokoh masyarakat terhadap kerusakan hutan serta pandangan mereka terhadap kondisi tersebut. Selama ini masyarakat hanya mampu memanfaatkan hutan tanpa memiliki kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan. Lemahnya kesadaran masyarakat ini menjadi lebih parah lagi dengan adanya perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan hasil hutan sebagai produknya, yang kurang mampu memberi tauladan tentang arti kelestarian pada masyarakat.

Kondisi yang digambarkan di atas semakin memprihatinkan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu. Berdasarkan keterangan Aparat jagawana Dinas Kehutanan diduga ada oknum aparat melakukan “*abuse of power*” karena upaya maksimal yang telah dilakukan dalam operasi pengamanan dan penjagaan, yang sukses menangkap sejumlah besar penebang liar tidak disertai proses hukum lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan dan operasi yang dilakukan kurang disertai tindakan hukum yang tegas yang pada akhirnya dapat mendorong sikap lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.

Berdasarkan pernyataan seorang tokoh masyarakat serta pendapat seorang tokoh muda, masyarakat kurang atau jarang sekali diikutsertakan memecahkan permasalahan kawasan hutan, khususnya masyarakat yang biasa bekerja di hutan (penebang liar) tidak diajak mencari jalan keluar untuk merubah

cara kerja mereka dengan kebutuhan ekonomi tetap bisa terpenuhi. Kondisi ini dipandang oleh masyarakat bahwa Pemerintah daerah kurang memiliki koordinasi dan sosialisasi dalam upaya pengelolaan dan pelestarian hutan melalui tindakan yang melibatkan masyarakat kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting.

5.3.3. Analisis Respon Pengusaha

Masyarakat sekitar kawasan hutan yang bekerja sebagai pengusaha memiliki peranan yang berbeda dalam memandang kerusakan hutan dan partisipasinya dalam upaya pengelolaan serta pelestarian hutan. Pengusaha yang memanfaatkan hasil hutan sebagai objek usahanya memiliki kepentingan yang cenderung profitable atau menguntungkan dalam memandang permasalahan hutan Taman Nasional Tanjung Puting ini. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan salah seorang pengusaha yang cenderung menyudutkan kebijakan yang telah dilakukan Pemda dalam pelarangan dan perdagangan kayu hutan. Kebijakan Pemerintah mengakibatkan ekonomi masyarakat berkurang karena salah satu mata pencarian mereka dilarang. Ditambahkan juga oleh salah seorang cukong kecil yang mengatakan bahwa karena dorongan kebutuhan ekonomi di mana saat pekerjaan sebagai pemborong tidak mencukupi, mereka butuh menebang pohon di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting karena hasilnya cukup banyak dengan menggunakan modal sedikit.

5.3.4. Analisis Respon LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap Taman Nasional Tanjung Puting yaitu *Conservation Internasional Indonesia (CII)*, dan Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin). Permasalahan kerusakan lingkungan Taman Nasional Tanjung Puting tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah,

menurut salah seorang staf Yayasan, penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Pihak LSM yang peduli terhadap kondisi kawasan hutan lebih memusatkan pada tindakan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat sekitar. Hal ini tampak ditunjukkan oleh mereka dengan adanya program pendidikan ataupun pelatihan bina lingkungan. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak LSM bertujuan untuk menguatkan kesadaran lingkungan masyarakat disertai kemandirian dalam mengatasi kebutuhan hidup.

5.4. Usulan Peranserta Stakeholders

Berdasarkan evaluasi respon dan analisis faktor hambatan dalam pengelolaan serta harapan agar kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting dapat lestari dan bermanfaat maka dapat dikaji usulan peranserta Pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam beberapa hal sebagai berikut:

5.4.1. Usulan Peranserta Pemda

Pemerintah daerah sebagai 'leader action' dalam upaya pengelolaan dan pelestarian hutan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting diharapkan lebih memiliki peranserta yang dominan dan strategis. Berdasarkan kajian peranserta pemerintah daerah terhadap kerusakan hutan meliputi penanganan dan pengembangan beberapa hal yang menyangkut aspek perbaikan kondisi hutan, aspek perlindungan dan pengamanan hutan, serta aspek pembinaan masyarakat terhadap arti penting hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Seluruh peranserta tersebut harus bersifat koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak dimana pemerintah daerah berlaku sebagai pihak yang progresive (kearah kemajuan).

Berdasarkan pertimbangan seperti yang diuraikan di atas dapat digambarkan peranserta Pemda sebagai berikut:

1. Dalam perbaikan kondisi hutan

Rehabilitasi kawasan hutan sangat diperlukan mengingat tingkat kerusakan yang sangat tinggi (70%). Sementara selama ini tindakan rehabilitasi masih terbatas hanya dilakukan di sekitar pesisir dalam bentuk penghijauan pantai dengan tujuan menjaga keutuhan areal pantai sebagai penyangga kawasan hutan. Rehabilitasi sekitar pantai ini tetap diperlukan mengingat banyaknya lahan sekitar pantai yang rusak baik akibat alam maupun karena kegiatan pembukaan *sawmill* oleh pengusaha. Peranserta ini harus tetap memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat baik masyarakat pemukim maupun masyarakat pengusaha agar tercipta keselarasan upaya yang berdasarkan kesadaran, keadilan serta kebijakan.

2. Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan masih tetap dibutuhkan untuk terus ditingkatkan, diharapkan upaya ini dapat menciptakan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan kawasan hutan. Perlindungan dan pengamanan hutan ini tidak cukup kalau hanya dengan operasi saja, namun harus diikuti dengan upaya penegakan hukum yang berkelanjutan secara adil dan tegas.

3. Pembinaan kesadaran lingkungan hutan

Salah satu bentuk yang dapat dipertimbangkan dalam upaya partisipatif pelestarian hutan dapat melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, pendidikan maupun pelatihan kesadaran lingkungan kepada masyarakat dengan melibatkan tenaga profesional, akademisi, maupun kerja sama dengan LSM setempat.

5.4.2. Usulan Peranserta Masyarakat

Masyarakat luas selaku stakeholder harus tetap dipandang memiliki kepentingan dan kebutuhan akan keberadaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Peranserta masyarakat dalam mengatasi kerusakan hutan dapat dipandang paling menentukan mengingat keberadaan mereka di sekitar kawasan. Peranserta aktif masyarakat dapat digali dan diupayakan melalui keterlibatan mereka dalam penggalan permasalahan ataupun hambatan-hambatan dalam penanganan hutan juga keterlibatan mereka dalam menentukan kebijakan. Peranserta masyarakat ini sangat penting mengingat dorongan akan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hutan sangat besar.

Selain uraian di atas perlu juga keterlibatan atau peranserta masyarakat dalam mendukung program atau peranserta yang dilakukan oleh pihak-pihak lain guna mengintegrasikan kepentingan bersama.

5.4.3. Usulan Peranserta Pengusaha

Masyarakat membutuhkan alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi karena setelah diberlakukannya beberapa kebijakan, larangan, serta penertiban yang menyangkut kawasan hutan, membuat kepentingan ekonomi masyarakat kurang terpenuhi. Masyarakat sebelumnya memandang lebih cepat dan mudah mendapatkan uang dari hasil hutan, namun sekarang banyak dari mereka yang terpaksa menjual harta benda untuk bertahan hidup. Peranserta masyarakat dalam pencarian dan pengembangan alternatif ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting membutuhkan dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah. Peranserta pengusaha dan masyarakat setempat dapat diarahkan dalam penanganan pengembangan obyek wisata alternatif Danau Burung di Hulu Sungai Buluh Besar.

5.4.4. Usulan Peranserta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Peranserta LSM berpijak pada keberadaan dan kondisi masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan kawasan hutan yang ada. Peranserta LSM secara fungsional adalah memberdayakan masyarakat terhadap kebutuhan dan kepentingan hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup mereka. Mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang rendah maka peranserta LSM memiliki posisi yang strategis dalam bidang pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Namun begitu tidak dapat diabaikan diperlukannya juga adanya peranserta LSM dalam menciptakan kondisi kawasan hutan yang cukup kondusif dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, agar masyarakat dalam upaya pembinaan dan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh LSM disamping upaya pembinaan lingkungan adalah memberikan upaya-upaya produktif kepada masyarakat baik dalam bentuk gagasan maupun teknologi yang dapat diserap dan diterapkan mereka baik dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan maupun pelestariannya.

5.5. Pendekatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting

Berdasarkan pendapat Hadi (2001) mengenai pembangunan berwawasan lingkungan, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam merencanakan pengelolaan kawasan:

1. Berorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi;
2. membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat;
3. menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat;

4. membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis;
5. membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan keterlibatan semua pihak, sehingga didapat informasi yang aktual.

Hadi (2001) mengemukakan konsep *the seven steps of planning* (tujuh langkah perencanaan) yang terdiri dari: (1) Merumuskan masalah; (2) Menetapkan tujuan; (3) Analisis kondisi (*fact appraisal*); (4) Mencari alternatif solusi; (5) Memilih alternatif terbaik; (6) Mengkaji alternatif pilihan dan; (7) Mengimplementasikan. Penerapan konsep tersebut diharapkan pada akhirnya akan menghasilkan suatu pendekatan pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting yang lebih baik.

Penerapan masing-masing unsur tujuh langkah perencanaan di atas dalam mengkaji pembangunan pelestarian lingkungan hutan Taman Nasional diuraikan di bawah ini:

1. Perumusan Masalah

Kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting selain terkenal dengan orangutannya juga memiliki keanekaragaman tumbuhan dan pohon-pohon yang sangat tinggi nilainya, di mana kekayaan hayati kawasan Taman Nasional diperkirakan tinggal 30% yang disebabkan oleh:

- Penebangan liar (*illegal logging*); penebangan liar merupakan ancaman yang paling nyata. Meskipun dilakukan metode dan cara yang berbeda-beda, namun akibatnya adalah sama yaitu kerusakan hutan. Penebangan telah mengambil pohon yang langka di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting dan juga merusak dimana satwa orangutan tergantung padanya, mengancam keberadaannya, disertai akibat lain yaitu rusaknya tumbuhan, populasi burung, mamalia dan hewan lainnya terancam.

- Penambangangan emas tanpa ijin (PETI); pertambangan menyebabkan kerusakan 10% keseluruhan hutan yang diberada di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. kawasan yang terbuka akibat penambangan emas telah mengubah kondisi hutan menjadi gurun tandus dimana tidak dapat ditumbuhi oleh apa-apa.



Foto. Dok. Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2002

Gambar 11. Tanah kritis akibat dari penambangan emas tanpa ijin (PETI)

- Perambahan hutan untuk lahan perladangan / kebun; perambahan hutan oleh masyarakat membuat kawasan Taman Nasional semakin rusak karena penduduk membuka lahan dengan cara membakar di waktu musim kemarau sehingga sering terjadi kabakaran di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, karena mereka lupa untuk memadamkannya.

2. Menetapkan tujuan

Perlunya upaya pelestarian untuk menghindari kepunahan kekayaan hutan yang di dalamnya meliputi pohon-pohon bernilai tinggi dan hewan/binatang yang langka.

3. Mengkaji fakta

Menggunakan pendekatan Analisis *SWOT* yaitu Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunity*), dan Ancaman (*Treath*), fakta-fakta yang ada dikaji sebagai berikut:

- *Strength* (kekuatan), Pemda dibantu aparat kepolisian merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan dalam mengatur dan mengamankan kawasan hutan. Selain itu ada tokoh masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan yang baik serta LSM yang sangat peduli terhadap kelestarian kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting.
- *Weaknesses* (kelemahan), Tingkat pengetahuan masyarakat yang cukup rendah karena tidak didukung oleh pendidikan membentuk tingkat kesadaran lingkungan yang rendah, ditambah lagi adanya oknum baik dari Pemda maupun masyarakat yang memiliki mentalitas dan moralitas yang rendah semakin memperlemah kesadaran akan perlunya pelestarian kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting.
- *Opportunity* (peluang), masih terbukanya pengembangan wilayah kawasan misal sebagai obyek wisata seperti Danau Burung dapat dijadikan sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tergantung pada hasil hutan. Selain itu terus diupayakannya pembinaan dan pelatihan serta penelitian akan lebih meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat sekitar kawasan.
- *Treath* (ancaman), adanya penebang liar (*illegal logging*), perdagangan hasil hutan yang berupa kayu ilegal, penambangan emas tanpa ijin (PETI), perambahan hutan serta penegakan hukum yang lemah merupakan ancaman upaya kelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting.

4. Mencari alternatif pilihan

- Mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dengan keterlibatan aktif masyarakat secara langsung dalam menjaga Taman Nasional Tanjung Puting dari kerusakan disertai penetapan aturan perlindungan kawasan hutan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hutan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai hutan konservasi, pendidikan dan juga merupakan tambahan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk.
- Meningkatkan peran Pemda sebagai pendorongan terhadap masyarakat dalam mengupayakan penjagaan dan pelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting melalui peraturan dan kebijakan yang disertai tindakan tegas sebagai wujud penegakan hukum terhadap pelanggar 'siapa saja' yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan baik itu dari masyarakat maupun dari aparat sendiri.
- Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang perlindungan dan pelestarian di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, sehingga masyarakat lebih mengerti apa yang harus dilakukan untuk melestarikan potensi tersebut dalam rangka mewujudkan hutan yang tetap lestari.

5. Memilih alternatif terbaik.

Sebagai langkah awal dalam pelestarian dan perlindungan potensi yang ada di dalam kawasan maka perlu peranserta masyarakat dalam menjaga dan mengawasi potensi hutan Taman Nasional Tanjung Puting, memberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dalam melestarikan potensi-potensi itu baik berupa hewan/binatang maupun pohon-pohon yang ada di kawasan tersebut, dan menetapkan peraturan perlindungan potensi hutan Taman Nasional Tanjung Puting, sedangkan prioritas yang lain mengikuti.

6. Mengkaji alternatif pilihan

Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian akan berdampak positif tumbuhnya rasa memiliki dan dapat menyatu dengan keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting sehingga tidak ada lagi penebangan liar, penambangan emas tanpa ijin, maupun perambahan hutan oleh penduduk. Keterlibatan masyarakat harus diikuti dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik melalui pendidikan, pelatihan dan penghayatan terhadap peraturan perlindungan kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting.

7. Mengimplementasikan

- Masyarakat terutama yang berdekatan dengan kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, untuk menjaga dan mengawasi keberadaan potensi-potensi dari hutan Taman Nasional Tanjung Puting ini, dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.
- Pemerintah melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai upaya penjaga dan pelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting dari masyarakat yang belum mengerti pentingnya keberadaan hutan bagi lingkungan pada umumnya, lebih jauh hutan itu karena tempat berlindung, sumber makanan dan tempat berkembang biaknya hewan orangan yang dilindungi oleh pemerintah.

5.6. Usulan Perencanaan

Masing-masing pihak selaku stakeholder harus memiliki kerangka yang sama di dalam mengupayakan kelangsungan keberadaan hutan. Hal ini akan dapat dicapai jika di dalam pengelolaam Hutan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting ada prespektif yang sama dari berbagai pihak yang terkait erat dengan keberadaan hutan tersebut. Prespektif tersebut harus dapat memenuhi

kepentingan dan fungsi hutan baik secara ekologis, sosial serta ekonomis sehingga akan tercipta kelangsungan keberadaan hutan yang *suitable yield* atau lestari. Dengan kerangka yang sama diharapkan segala upaya pelaksanaan pelestarian hutan sebagai bagian dari pengelolaan hutan akan terintegrasi dan terkoordinasikan dengan baik. Integrasi komponen stakeholder akan lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelestarian hutan yang mana dengan sendirinya akan tumbuh upaya partisipatif yang lebih besar baik secara individu maupun kelembagaan. Hambatan-hambatan yang membatasi antara stakeholders harus dapat dipecahkan sebaik mungkin dengan cara mengkomunikasikan dan memaknai secara sama semua pihak yang terkait didalamnya. Jika integrasi dan koordinasi dapat berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan dan pengelolaan yang telah ditetapkan sebelumnya maka akan terbangun sebuah sistem dan budaya pengelolaan lingkungan dan pada akhirnya akan menimbulkan perilaku sadar lingkungan yang tinggi. Nilai kesadaran lingkungan yang tinggi akan menjadi kontrol yang sangat strategis dalam segala aktivitas masyarakat luas terhadap keberadaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Untuk itu usulan yang dapat disampaikan dalam perencanaan pengelolaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting adalah menciptakan sebuah sistem budaya terhadap nilai-nilai kelestarian lingkungan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Respon Pemerintah:** Pemda beranggapan bahwa kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat bahwa Taman Nasional harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Merusak hutan dianggap biasa, apalagi karena ada yang menyokong membiaya mereka untuk melaksanakan kegiatan penebangan.
2. **Respon masyarakat:** kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting merupakan tanggungjawab Pemerintah, karena kerusakan itu memang disebabkan oleh penebangan liar (*illegal logging*), penambangan emas tanpa ijin (PETI), perambahan hutan untuk perladangan, dan kerena alam (kebakaran). Kerusakan paling banyak karena diakibatkan oleh penebangan liar yang melibatkan oknum aparat.
3. **Respon Pengusaha:** kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga ikut andil dalam merusak lingkungan kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, karena dengan limbah CPO-nya telah mencemari Sungai Sekonyer dengan terjadinya kematian ikan-ikan dan binatang air liannya.
4. **Respon Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** masalah kerusakan hutan Taman Nasional Tanjung Puting ini tidak bisa dibebankan hanya pada Pemerintah tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan beberapa alternatif yang dapat disarankan agar kelestarian hutan Taman Nasional Tanjung Puting, dapat diwujudkan dan berkelanjutan:

A. Bagi Pemerintah:

1. Dalam perencanaan pengelolaan terhadap kawasan hutan Nasional Tanjung Puting, hendaknya selalu melibatkan masyarakat. Karena tanpa adanya keterlibatan seperti itu akan mengakibatkan yang sudah hutan yang sudah rusak akan bertambah kerusakannya, dengan keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan dan tujuan yang diinginkan maka akan tercapai apa yang diinginkan.
2. Perlu adanya penyuluhan yang lebih sering kepada masyarakat di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, terutama potensi hutan itu dan hewan/binatang yang dilindungi oleh pemerintah, seperti sosialisasi peraturan pelarangan menebang pohon di kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting, dan bagaimana menjaga dan melestarikan serta tindakan yang apa yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan.
3. Dalam upaya pelestarian terhadap potensi-potensi yang ada agar lebih mengidentifikasi penyebab kerusakan sehingga dapat ditangani untuk mengurangi kerusakan yang akan terjadi lebih lanjut, dengan terjun langsung kelokasi dan melihat langsung, walaupun itu sulit untuk dijangkau karena tugas harus dilaksanakan.

B. Bagi Masyarakat:

1. Karena masih sering penebangan liar terjadi terutama oleh masyarakat yang tidak mengindahkan adanya himbauan oleh pemerintah daerah, ini perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dan hendaknya masyarakat dapat meningkatkan keikutsertanya dalam penjagaan hutan Taman Nasional Tanjung Puting.

2. Perlu adanya kerjasama antar masyarakat untuk saling mengawasi dan menjaga potensi hutan dan kawasan-kawasan yang dilindungi, agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut.

C. Bagi Pengusaha:

1. Hendaknya dalam mendirikan suatu pabrik harus dilengkapi AMDAL sehingga kalau terjadi suatu kerusakan atau terjadi kesalahan dalam pengelolaan lingkungan dapat ditinjau ulang.
2. Dalam melakukan pembuangan limbah hendaknya, limbah cair tersebut harus sudah dinetralkan dulu baru bisa dibuang ke air Sungai.

D. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):

1. Lebih aktif lagi memberikan sosialisai kepada masyarakat dan lebih kepada arah pengertian betapa pentingnya lingkungan bagi kita semua karena kalau lingkungan itu rusak masyarakat semua yang akan menanggung akibatnya dari kerusakan tersebut.
2. Penyuluhan dan pelatihan yang membuat masyarakat agar hidupnya tidak selalu tergantung dengan hasil hutan. Dengan cara yang sudah dilakukan agar lebih ditingkatkan lagi.

E. Saran bagi perencanaan:

Perlu dibentuknya sebuah wadah/lembaga khusus yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Balai Taman Nasional Tanjung Puting untuk membentuk community development yang berwawasan lingkungan melalui berbagai rancangan aksi, teladan, pola pikir, sosialisasi serta pengorganisasian, yang mana di dalamnya harus dapat melibatkan semua stakeholders yang memiliki kerangka kerja yang sama dalam memandang permasalahan hutan Taman Nasional Tanjung Puting dengan satu tujuan yang sama yaitu mendidik mental dan budaya masyarakat luas terhadap nilai-nilai keindahan dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solidin, 2001. **Analisis Kebijakan dari Formulasi dan Implimentasi Kebijakan Negara**. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta
- Achmad Roestandi, SH. 1992. **Responsi Filsafat Hukum**. Armico, Bandung
- Alam Setia Zain, S.H., 1996,. **Hukum Lingkungan Konservasi Hutan**. Rineka Cipta. Jakarta
- Al – Zagie. I, 2003. **Sungai Sekonyer Tercemar Limbah CPO**. Suara Pinggiran Hutan (SUMPITAN). Volume 1/ April 2003
- Anonymous, 1990, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**. Departemen Kehutanan. Jakarta
- Anonymous, 1999, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Kehutanan**, Departemen Kehutanan. Jakarta
- Anonymous , 2001, Kantor Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin. Barat). **Potensi Tegakan Taman Nasional Hutan Taman Nasional Tanjung Puting**. Pangkalan Bun.
- Anonymous, 2002, **Orangutan yang Merana**, Iptek dan Kesehatan. (Kompas 3 Maret 2002)
- Anonymous, 2002, **Kompensasi TNTP Rp 2 (dua) Milyar**. <http://www.pakta.org/news/viewnews.asp?10=2098>. (Sumber: Banjarmasin Post, Selasa, 9 Juli 2002, Pangkalan Bun) (dikases: 29 September 2003)
- Anonymous, 2002, **Respon Bisnis dan Pemerintah Daerah Terhadap Otonomi Daerah**. Disampaikan dalam Diskusi Panel. Jurnal Managemen Indonesia. Februari. Jakarta
- A. Tresna Sastrawijaya, 1991, **Pencemaran Lingkungan**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2001, **Kecamatan Kumai Dalam Angka**. Pangkalan Bun. Kalimantan Tengah
- Brilliantono. E, 2003. **Menjelang Pemilu Hutanpun Bakal Diserbu**, http://www.Indonesia.house/global_forest_watch. (Bisnis.Com 03/04/2003: diakses 02 September 2003)
- Brindamour. B, 2002. Ancaman Terhadap Orangutan, Yayasan Orangutan. www.orangutan.org/yayaorin. (diakses: 14 Agustus 2003)
- Chidir Ali, SH, 1987. **Responsi Hukum Acara Perdata**. Armico, Bandung

- Ciptana Arya Gede, 2002. **Peranserta Nelayan dan Pemandu Wisata Bahari Dalam Pelestarian Lingkungan.** (Studi Kasus di Kawasan Pariwisata Lovina, Singaraja, Bali). (Tesis tidak dipublikasikan).
- Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2001. **Buku Informasi Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.**
- Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Taman Nasional Tanjung Puting. **Laporan tahunan 2001,** Pangkalan Bun. Kalimantan Tengah
- Ely, 2000, **Republik Indonesia Tetapkan Moretorium Perdagangan Ramin,** [http://Kompas.Com/Kompas-cetak/0008/31/Ekonomi/riak 14.htm](http://Kompas.Com/Kompas-cetak/0008/31/Ekonomi/riak%2014.htm). (Kamis, 31 Agustus 2000: diakses 02 Setember 2003)
- Hadi, Sudharto P. 1997. **Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif, Kualitatif dan Kajian Tindak.** Bahan Kuliah. Fisip – Undip. Semarang
- Hadi, Sudhartho P., 2001. **Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan.** Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Hadi, Sudhartho P., 2002. **Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan.** Universitas Diponegoro. Semarang
- Hanafi. M, 1997, **Manajemen.** UPP. AMP. YKPN. Yogyakarta.
- Hardesty, D, L.,1977, **Ecological Anthropological,** New York, John Wiley and Scus.
- Herbeat Benson, M.D, Miriam Z. Klipper, 1986. **Respon Pengenduran.** Aerlangga. Jakarta
- ICEL (*Indonesia Center for Environmental Law*), 1999. **Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Orde Baru, Potensi dan Harapan Menuju good environmental governance.** Pres. Jakarta
- Kleden Hermin Y. et all, 2002. **Kayu Haram dari Jantung Kalimantan.** (Tempo, Edisi 21-27 Oktober 2002)
- Mangku Sitepoe, 1997, **Usaha Mencegah Pencemaran Udara,** Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- M. Tri Desiantoro, 1999, **Studi Konsumsi Kayu Bakar Untuk Keperluan Rumah Tangga Sehari-hari Di kelurahan Candi Kec. Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat .** (Skripsi tidak dipublikasikan).
- Nadlasyah. RE, 2002, **Tak Hanya Gerta,** [htt://www.Kompas.com/Kompas-cetak/0203/UTAMA/terg 01.htm](http://www.Kompas.com/Kompas-cetak/0203/UTAMA/terg%2001.htm) (diakases: 21 September 2003)
- Nani Djuangsih, 1994. **Dampak Polutan Terhadap Predator Tingkat Tinggi.** Makalah disampaikan dalam Simposium Pertama Mengenai Berang-

Berang di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) dengan Asia Wetland Bureau (AWB). Bogor 7 April 1994.

Ninie Suparni, S.H. 1994, **Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan**, Sinar Grafika, Jakarta

Nawawi Hadari, 1995, **Metode Penelitian Bidang Sosial**. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Otto Soemarwoto, 2001, **Atur Diri Sendiri**, Gadjah Mada University Prees

Pramudya Sunu, 2001., **Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001**. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

Profil Desa/Kelurahan Candi, 2002. **Badan Pusat Statistik**. Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah

Profil Desa/Kelurahan Kumai Hulu, 2002. **Badan Pusat Statistik**. Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah

Profil Desa/Kelurahan Kumai Hilir, 2002. **Badan Pusat Statistik**. Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah

Profil Desa/Kelurahan Sei Kapitan, 2002. **Badan Pusat Statistik**. Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan. 2003, **Kelurahan Candi**. Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan. 2003, **Kelurahan Kumai Hulu**. Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan. 2003, **Kelurahan Kumai Hilir**. Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan. 2003, **Desa Sei Kapitan**. Kabupaten Kotawaringin Barat. Kalimantan Tengah

Salim, H.S., 1997, **Dasar-Dasar Hukum Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta

Sedarmayanti., 2003, **Good Governance (Keperintahan yang Baik), Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Retruksisasi dan Pemberdayaan**. Mandar Maju. Bandung

Silvariani., 1994, **Pemanfaatan Lahan Terlantar Sebagai Usaha Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat**. (Sekripsi tidak dipublikasikan).

Sukmantoro. W., 2002, **Orangutan dan Problem Kawasan Pelestariannya di Taman Nasional Tanjung Puting**.
<http://www.angelfile.com/nt2/fifa/FIPA/new%20&20Event/new%2067.htm>.
(FIPA's Source;the Indonesia Nature Conservation newletter, Desember 1, 2002: diakses: 8 September 2003)

Sukmantoro. W dan Misno., 2003, **Suara-suara yang Tertinggal**, Ranting. Volume, 5 Februari 2003. Pangkalan Bun

Uphoff, Norman, 1988, **Menyesuaikan Proyek Pada Manusia**, Jakarta, UI Press.

Wim Giesen, 1994. **Habitat Changes In Wetlands of The Greater Sunda's and Implication for Biodiversity**. Makalah disampaikan dalam Simposium Pertama Mengenai Berang-Berang di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) dengan Asia Wettand Bureau (AWB). Bogor 7 April 1994.

Yani Akhmad, 2003, **Yayasan Orangutan Indonesia**, Suara Masyarakat Pinggiran Hutan (SUMPITAN). Volume 1 / April 2003